

LKIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

2024



Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta

KATA PENGANTAR

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu SKPD di Jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas mengelola Pertamanan, Pemakaman, Kehutanan dan Taman Margasatwa Ragunan di Kota Jakarta. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki cakupan tugas pokok dan fungsi yang cukup luas, yakni Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman, Jalur Hijau, Hutan Kota, Kebun Bibit, Taman Margasatwa Ragunan serta Pelayanan Pertamanan, Pemakaman dan Kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta senantiasa melakukan upaya terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun harus diakui bahwa penyelenggaraan tugas fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya mencapai kinerja yang diharapkan.

Selama tahun 2024, Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari tujuan dan sasaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, telah dilaksanakan dengan baik dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu keseluruhan kinerja yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja 2024 juga telah dilaksanakan seoptimalnya dan akan diuraikan lebih mendetail dalam LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang memuat gambaran dan evaluasi capaian kinerja. Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dapat diterbitkan. Masih banyak tugas, tanggung jawab serta tantangan yang dihadapi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta kedepan, namun dengan dukungan sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait lainnya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota bertekad untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

Akhir kata semoga laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif serta dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Pertamanan
dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta



Dr. Bayu Meghantara, S.IP., M.Si
NIP 197205201991011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Seluruh program dan kegiatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, pencapaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 diukur melalui 3 (tiga) kelompok sasaran yaitu Sasaran Strategis, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional yang merupakan satu kesatuan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Tiap indikator akan dihitung pencapaiannya dan dijabarkan secara menyeluruh termasuk penyerapan anggarannya. Berikut pencapaian dari ketiga kelompok sasaran tersebut:

No	Kelompok Sasaran	Jumlah indikator	Tercapai	Tidak Tercapai
1	Sasaran Strategis	4	4	0
2	Sasaran Khusus	8	8	0
3	Sasaran Operasional	4	2	2
Total		16	14	2

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di tahun 2024 tercapai sebanyak 14 indikator dari 16 indikator yang ditargetkan (87,5%). Pada bab Akuntabilitas Kinerja diuraikan secara lebih lengkap atas capaian indikator kinerja baik yang tercapai sesuai target maupun yang tidak tercapai berikut faktor keberhasilan dan penghambat. Dari aspek anggaran, pagu APBD TA 2024 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp. 1.295.564.752.481,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.232.671.609.222,- sehingga didapatkan prosentase serapan anggaran sebesar 95,15%. Sisa anggaran yang tidak terserap merupakan efisiensi penggunaan anggaran.

Pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran di tahun 2024 telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Adanya beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai, tentunya akan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota agar melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan dan pengawasan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar ke depannya semua target kinerja yang sudah diperjanjikan bisa tercapai lebih baik dari sebelumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 LATAR BELAKANG 1

 1.2 TUJUAN DAN MANFAAT 1

 1.3 KEDUDUKAN DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA..... 2

 1.4 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 2

 1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 4

 1.6 SUMBERDAYA MANUSIA 6

 1.7 TINDAK LANJUT LHE AKIP 2023..... 8

 1.8 SISTEMATIKA PENULISAN..... 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 12

 2.1 TUJUAN DAN SASARAN RPD 2023-2026 12

 2.2 RENSTRA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA..... 14

 2.3 PERJANJIAN KINERJA 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26

 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024..... 26

 3.2 CAPAIAN STRATEGIS KINERJA 28

 3.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 57

 3.4 ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA 59

 3.5 INOVASI DAN PENGHARGAAN 60

 3.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN 62

BAB IV PENUTUP 68

 1.1 KESIMPULAN 68

 1.2 RENCANA TINDAK TAHUN 2025 68

LAMPIRAN 69

 1. PERJANJIAN KINERJA 69

 2. PENGHARGAAN DARI TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONAL 80

 3. BERITA ACARA TLHE SAKIP TAHUN 2023 82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Sumber Daya Manusia Tahun 20246

Tabel 2. TLHE SAKIP 2023..... 10

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran RPD dan Renstra 2023-2026 13

Tabel 4. Target Tujuan Renstra Tahun 2023-2026..... 15

Tabel 5. Target Sasaran Renstra Tahun 2023-2026 16

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama 2023-2026 17

Tabel 7. Pagu Anggaran Tahun 2024 22

Tabel 8. Program, Kegiatan dan subkegiatan pendukung indikator kinerja 23

Tabel 10. Capaian Kinerja Organisasi 2024 26

Tabel 11. Rekapitulasi Kinerja Organisasi Tahun 2024..... 28

Tabel 12. Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024 28

Tabel 13. Capaian Indeks Kualitas Lahan 29

Tabel 14. Sebaran Capaian Indeks Kualitas Lahan Berdasarkan Wilayah 30

Tabel 15. Penanaman/penghijauan Tahun 2024 31

Tabel 16. Pembangunan Taman, Hutan, Makam TA 2024 32

Tabel 17. Penataan RTH Taman, Hutan dan makam TA 2024 33

Tabel 18. Perbandingan Capaian IKTL Dengan Target Nasional, Renstra, Renja dan Perkin . 34

Tabel 19. Capaian Indikator persentase Ruang Terbuka Hijau 35

Tabel 20. Daftar Aset dari Serah Terima Fasos Fasum Tahun 2024..... 37

Tabel 21. Capaian Indikator Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan Ruang Terbuka Hijau Hutan 43

Tabel 22. Pembangunan dan Penataan Hutan Kota 2024..... 43

Tabel 23. Kegiatan Penanaman Bibit Mangrove Dengan Skema CSR Bersama Pihak Eksternal45

Tabel 24Capaian Indikator Persentase Wilayah kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru.. 49

Tabel 25. Pembangunan/Penataan Infrastruktur Hijau Biru Terintegrasi 2024 49

Tabel 26. Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi Sampai dengan tahun 2024 50

Tabel 28. Capaian Kinerja Sasaran Khusus..... 52

Tabel 29. Capaian kinerja Sasaran Operasional..... 56

Tabel 30. Realisasi Anggaran 2024 57

Tabel 31. Realisasi Anggaran Tahun 2024 Per UKPD 58

Tabel 32. Efisiensi Penggunaan Anggaran 2024 58

Tabel 33. Capaian Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi 62

Tabel 34. Perhitungan Nilai Efisiensi Indikator Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi 64

Tabel 35. Capaian Kinerja pada Sasaran peningkatan Kualitas Lahan dan hutan 65

Tabel 36. Perhitungan Nilai Efisiensi Indikator Persentase penambahan Luas dan Kualitas Lahan RTH Hutan 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota4

Gambar 2. Sebaran ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan.....7

Gambar 3. Sebaran ASN Berdasarkan Golongan7

Gambar 4. Surat Penyampaian TLHE SAKIP 20239

Gambar 5. Instruksi Sekda Nomor 19 Tahun 2024 18

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 2024 19

Gambar 7. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2024..... 20

Gambar 8. Trend Capaian Nilai IKTL Provinsi DKI Jakarta 2021-2024 30

Gambar 9. Prosentase RTH Publik di Jakarta satu..... 36

Gambar 10. Berita Acara Serah Terima Aset Fasos Fasum 42

Gambar 11. Pembangunan RTH Taman Setu Biru (Kampung Setu RT 007 RW 004 Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur) 44

Gambar 12. Pembangunan RTH Taman Haji Niman (Jl. Lebak Bulus V RT.07 RW.04, Kelurahan Cilandak Carat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan)..... 44

Gambar 13. Pembangunan RTH Taman Melati (Jl. AUP Barat No.1 RT 009/06, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan) 44

Gambar 14. Proses Pembangunan Sistem Informasi Semarak Hijau 61

Gambar 15. Penghargaan dalam rangka Jakarta Innovation Awards 2024 dari Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta 62

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bagi instansi pemerintahan, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Penyusunannya mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah serta Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman, memiliki tanggung jawab dalam menyusun LKIP dan melaporkan capaian terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja pembangunan setiap tahunnya.

Penyusunan LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang dijabarkan dalam Tujuan, dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perencanaan, yaitu; Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Selain itu dokumen LKIP juga sebagai instrumen yang digunakan untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) dalam rangka perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dari penyusunan LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2024 ini adalah untuk menyampaikan informasi capaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sesuai yang diperjanjikan selama tahun 2024, dengan membandingkan capaian kinerja Dinas terhadap rencana kinerja Dinas.

Manfaat penyusunan LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi atas penggunaan anggaran melalui pengukuran capaian kinerja dan evaluasi serta penjelasan yang memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja selama periode tahun 2024.
- 2) Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja dan upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kendala dan hambatan yang ditemukan dapat dirumuskan strategi pemecahannya sehingga capaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dapat ditingkatkan secara simultan dan berkesinambungan.

1.3 KEDUDUKAN DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dipimpin oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berada dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah. Kepala Dinas melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota ditetapkan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman. Sehingga Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki peran strategis dan tanggungjawab atas terlaksananya pengelolaan pertamanan, pemakaman, jalur hijau dan kehutanan di Provinsi DKI Jakarta.

Sehubungan dengan hal itu maka tugas yang diemban oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pelayanan pertamanan dan pemakaman. Tugas pokok ini dijabarkan dalam beberapa fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, yaitu;

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
- b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
- c. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
- d. Pelaksanaan kebijakan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
- e. pelaksanaan pengelolaan pertamanan;
- f. pelaksanaan pengelolaan jalur hijau;
- g. pelaksanaan pengelolaan kehutanan;
- h. pelaksanaan pengelolaan konservasi flora dan fauna;
- i. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan pemakaman;
- j. pengembangan peran serta masyarakat di bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau, dan pemakaman;
- k. pengawasan dan pengendalian izin/non izin di bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau, dan pemakaman;
- l. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
- m. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penamanan dan hutan kota;
- n. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan

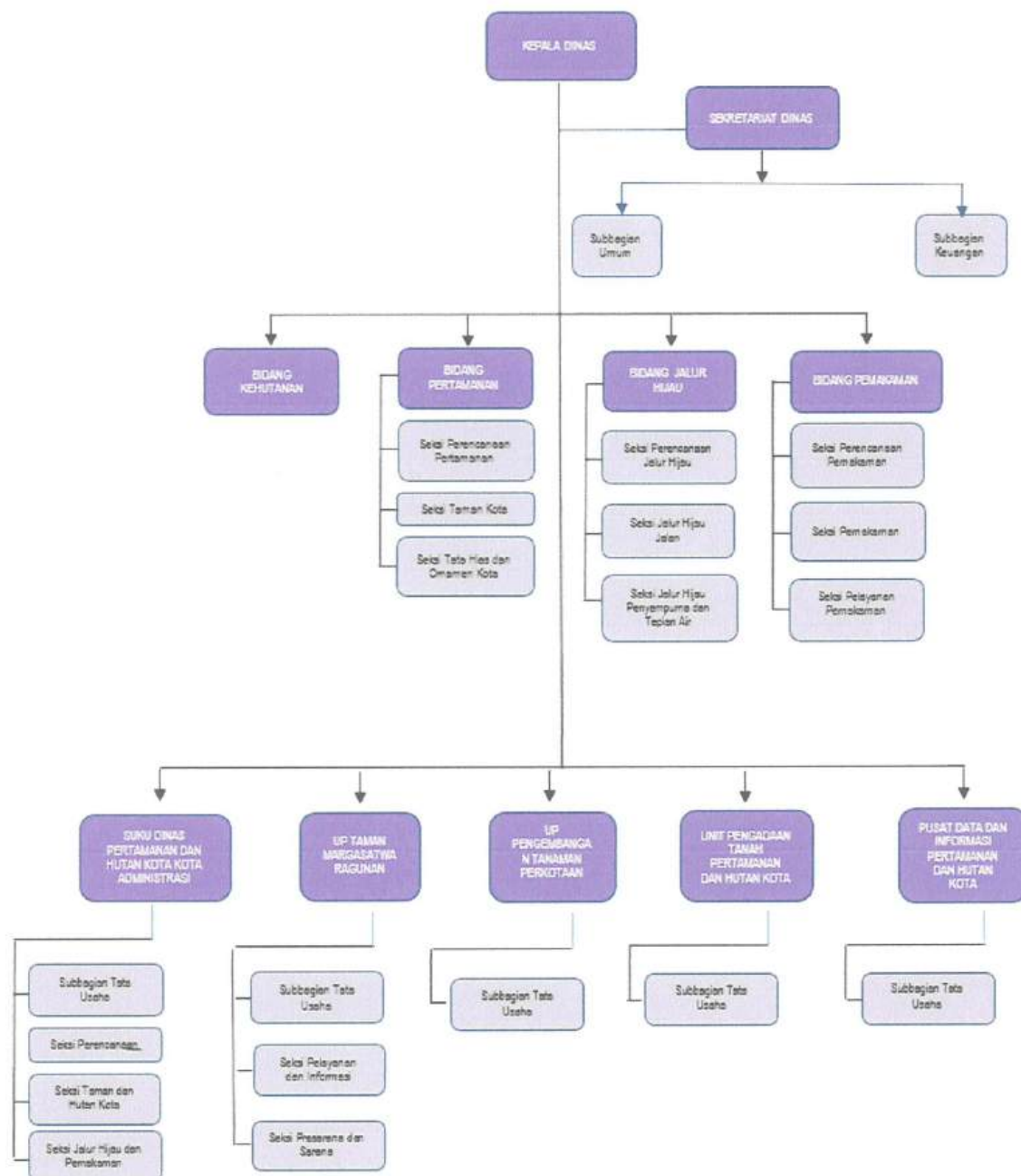
- pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman;
- o. pengelolaan data, informasi, dan transformasi digital pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman; dan
 - p. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tersebut, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Susunan organisasi struktural Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum; dan
 - 2) Subbagian Keuangan;
- b. Bidang Kehutanan;
- c. Bidang Pertamanan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Pertamanan
 - 2) Seksi Taman Kota; dan
 - 3) Seksi Tata Hias dan Ornamen Kota;
- d. Bidang Jalur Hijau, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Jalur Hijau;
 - 2) Seksi Jalur Hijau Jalan; dan
 - 3) Seksi Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air;
- e. Bidang Pemakaman, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Pemakaman;
 - 2) Seksi Pemakaman; dan
 - 3) Seksi Pelayanan Pemakaman;
- f. Suku Dinas Kota Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Perencanaan;
 - 3) Seksi Taman dan Hutan Kota; dan
 - 4) Seksi Jalur Hijau dan Pemakaman;
- g. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
 - 1) Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Seksi Pelayanan Informasi; dan
 - c) Seksi Prasarana dan Sarana;
 - 2) Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota yang membawahi Subbagian Tata Usaha; dan
 - 4) Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan Kota yang membawahi Subbagian Tata Usaha;

Secara rinci struktur organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta terlihat pada bagan dibawah.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 (RPD 2023-2026) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Renstra 2023-2026) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022. Dalam rangka mendukung pencapaian salah satu fokus perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPD 2023-2026 yaitu *built environment dimension* yang kemudian diturunkan menjadi salah satu tujuan RPD yaitu tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon, maka Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagai SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki mandat penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman, merumuskan aspek dan isu strategis pada bidang tersebut dengan mempertimbangkan telaahan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024, dan RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030. Aspek dan isu strategis tersebut yaitu;

1. Peningkatan kuantitas Ruang Terbuka Hijau

Terjaminnya ketersediaan RTH yang memadai dan berkualitas harus menjadi arahan pembangunan DKI Jakarta mengingat permasalahan mendasar kota bermula dari penataan ruang. Peran penting RTH dalam lingkungan kota dapat menjadi solusi terwujudnya lingkungan kota yang sehat. Keterbatasan lahan terbuka, pengelolaan lahan dan kepemilikan lahan di lingkungan perkotaan merupakan masalah terbesar yang dihadapi dalam perencanaan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta, sehingga diperlukan inovasi pemikiran dan perubahan paradigma yang mampu mengoptimalkan ruang kota yang tersedia untuk memenuhi fungsi Ruang Terbuka Hijau. Penambahan kuantitas RTH disini meliputi penambahan luasan dan tutupan lahan untuk RTH taman, makam, jalur hijau dan hutan di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kewenangan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

2. Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas merupakan salah satu bentuk pembangunan berkelanjutan, yang berperan dalam menyeimbangkan kegiatan pembangunan infrastruktur dan kawasan terbangun di perkotaan. Peningkatan kualitas RTH harus terus dilakukan menyesuaikan (adaptif) dengan perkembangan kota yang selalu berubah serta kebutuhan masyarakatnya. Peningkatan kualitas bisa dari peningkatan fungsi RTH selain fungsi ekologis dan estetika, seperti fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi dan fungsi mitigasi bencana. Selain itu bisa juga dari pengembangan inovasi terhadap elemen-elemen lanskap perkotaan dan pengembangan jejaring ruang hijau-biru untuk pemerataan sebaran RTH di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.

3. Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki tupoksi memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pertamanan, kehutanan dan pemakaman. Pelayanan tersebut harus terus ditingkatkan agar tercapai pelayanan yang prima yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya dengan pengembangan sistem pelayanan yang mudah, cepat dan terintegrasi.

Selain itu, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota juga memiliki tupoksi dalam pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Pengembangan peran serta ini bisa dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan, masyarakat berperan aktif dalam mengaktivasi taman, memberdayakan Kelompok Tani Hutan, dan lain sebagainya. Upaya pemberdayaan masyarakat ini perlu terus ditingkatkan agar Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

4. Peningkatan produktifitas dan integritas kerja aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik

Aparatur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota harus terus mengembangkan kapasitas dan kompetensinya dalam rangka mengoptimalkan produktivitas individu yang secara

langsung akan meningkatkan output dan outcome pencapaian tujuan organisasi. Selain itu aparaturnya Dinas Pertamanan dan Hutan Kota juga dituntut untuk meningkatkan integritas untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

1.6. SUMBERDAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aset dan modal terpenting dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dari suatu organisasi publik. SDM menjadi kunci bagaimana kinerja organisasi yang dihasilkan merupakan agregasi dari capaian kinerja individu. Oleh karena itu Dinas Pertamanan dan Hutan Kota selalu berupaya menjaga dan meningkatkan kompetensi SDM.

SDM yang ada di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, terbagi atas pegawai ASN dan non ASN. Pada tahun 2024, jumlah pegawai keseluruhan baik ASN dan non ASN adalah sebanyak 10.083 orang. Rincian data pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Sumber Daya Manusia Tahun 2024

No	UKPD	PNS	CPNS	PPPK	PJLP	Jumlah
1	Sekretariat Dinas	27		2	73	102
2	Bidang Pertamanan	25			1.010	1.035
3	Bidang Jalur Hijau	24			980	1.004
4	Bidang Kehutanan	27			175	202
5	Bidang Pemakaman	14			47	61
6	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Pusat	37			926	963
7	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Utara	30			1.253	1.283
8	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Barat	33			1.002	1.035
9	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Selatan	49			1.669	1.718
10	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Timur	49			1.573	1.622
11	Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	16			289	305
12	Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota	9			6	15
13	Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan Kota	9			9	18
14	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	129		1	590	720
	Jumlah	478		3	9.602	10.083

Untuk melihat pemetaan SDM Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berdasarkan kompetensi dan kualifikasinya, diperlukan sajian data berdasarkan pendidikan dan golongan. Grafik berikut menyajikan komposisi perbandingan ASN di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan:



Gambar 2. Sebaran ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan latar belakang pendidikan, SDM Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki latar belakang pendidikan bervariasi dari tingkat SD sampai Pasca Sarjana (S2). Sebaran tertinggi yaitu SDM dengan pendidikan Sarjana (209), berikutnya pendidikan SMA (137) dan pasca sarjana (51). Pendidikan SMP dan SD dengan jumlah paling sedikit yaitu 10 dan 5, secara berurutan.

Secara khusus untuk ASN, pemetaan juga bisa disajikan berdasarkan pangkat golongan. Pada grafik dibawah disajikan pemetaan SDM ASN berdasarkan golongan. Untuk golongan III memiliki jumlah terbanyak (214) disusul golongan IV (36) dan golongan II (117) serta golongan 1 (8). P3K sebanyak 3 orang merupakan klasifikasi golongan tersendiri yang berbeda dengan PNS.



Gambar 3. Sebaran ASN Berdasarkan Golongan

1.7. TINDAK LANJUT LHE AKIP 2023

Sesuai Surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5029/PA.02.02 tanggal 27 Desember 2023 perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah, terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti atas hasil evaluasi Implementasi SAKIP 2023 oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, yaitu:

- 1) Melakukan monev secara berkala dan berjenjang atas capaian kinerja untuk mewujudkan capaian sesuai dengan yang telah direncanakan
- 2) Melakukan perjanjian/komitmen kinerja secara berjenjang dan dilakukan monev berkala untuk mencapai kinerja yang diharapkan
- 3) Melakukan sosialisasi mengenai perencanaan kinerja dan melakukan monev secara berkala atas capaian kinerja pegawai untuk mencapai kinerja yang direncanakan
- 4) Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkala untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien dengan melampirkan bukti evaluasi perkin tiap TW dan melampirkan screenshot bukti validasi renkin di sistem e-TPP di setiap jenjang (eselon II, III, IV dan staf)
- 5) Melakukan cascading pengukuran kinerja/penyelarasan secara berjenjang dari tingkat pimpinan/eselon 2 hingga staf
- 6) Melakukan pengukuran kinerja dan memanfaatkannya untuk penyesuaian strategi dengan melampirkan rencana aksi/strategi setiap kegiatan untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien
- 7) Melakukan sosialisasi mengenai pengukuran kinerja dan melakukan monev secara berkala atas capaian kinerja pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan
- 8) Di masa mendatang agar menampilkan hasil revidi internal dalam penyusunan LKIP dan disampaikan kepada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi secara tepat waktu

Atas rekomendasi LHE implementasi SAKIP 2023 tersebut, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan telah menyampaikan laporan tindak lanjut kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta melalui surat Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Nomor 1357/KH.01.08 tanggal 5 Juli 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.



Nomor : 1397 / KH-01-08

5 Juli 2024

Sifat :

Lampiran :

Hal :

Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Evaluasi SAKIP Tahun
2023

Kepada
Yth. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 5029/PA.02.02 tanggal 27 Desember 2023 perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta (Distamhut) memperoleh nilai 74,75% dengan predikat BB. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dan untuk lebih meningkatkan efektivitas penerapan budaya kinerja, terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Distamhut, yaitu:
 - a. Melakukan monev secara berkala dan berjenjang atas capaian kinerja untuk mewujudkan capaian sesuai dengan yang telah direncanakan
 - b. Melakukan perjanjian/komitmen kinerja secara berjenjang dan dilakukan monev berkala untuk mencapai kinerja yang diharapkan
 - c. Melakukan sosialisasi mengenai perencanaan kinerja dan melakukan monev secara berkala atas capaian kinerja pegawai untuk mencapai kinerja yang direncanakan
 - d. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkala untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien dengan melampirkan bukti evaluasi perkin tiap TW dan melampirkan screenshot bukti validasi renkin di sistem e-TPP di setiap jenjang (eselon II, III, IV dan staf)
 - e. Melakukan cascading pengukuran kinerja/penyelarasan secara berjenjang dan tingkat pimpinan/eselon 2 hingga staf
 - f. Melakukan pengukuran kinerja dan memanfaatkannya untuk penyesuaian strategi dengan melampirkan rencana aksi/strategi setiap kegiatan untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien
 - g. Melakukan sosialisasi mengenai pengukuran kinerja dan melakukan monev secara berkala atas capaian kinerja pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan
 - h. Di masa mendatang agar menampilkan hasil reviu internal dalam penyusunan LKIP dan disampaikan kepada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi secara tepat waktu

Gambar 4. Surat Penyampaian TLHE SAKIP 2023

Adapun rincian tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP 2023, disajikan pada tabel dibawah dengan bukti dukung pada tautan berikut: <https://tinyurl.com/4dmr6a4r>.

Tabel 2. TLHE SAKIP 2023

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP
1	Melakukan monev secara berkala dan berjenjang atas capaian kinerja untuk mewujudkan capaian sesuai dengan yang telah direncanakan	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala melalui rapat koordinasi (perbulan) dipimpin langsung Kepala Dinas
2	Melakukan perjanjian/komitmen kinerja secara berjenjang dan dilakukan monev berkala untuk mencapai kinerja yang diharapkan	1) Perjanjian Kinerja Eselon 2, MPPH dan SKP sampai jenjang staf 2) Monev kinerja capaian organisasi secara berkala (triwulan) melalui emonev dan sistem KSD, terlampir screenshot emonev dan KSD
3	Melakukan sosialisasi mengenai perencanaan kinerja dan melakukan monev secara berkala atas capaian kinerja pegawai untuk mencapai kinerja yang direncanakan	1) Telah dilakukan sosialisasi penyusunan perencanaan kinerja pegawai (MPPH dan SKP) lingkup Dinas 2) Monev kinerja pegawai dilakukan berkala setiap bulan/triwulan melalui capaian renkin pada sistem etpp
4	Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkala untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien dengan melampirkan bukti evaluasi perkin tiap TW dan melampirkan screenshot bukti validasi renkin di sistem e-TTP di setiap jenjang (eselon II, III, IV dan staf)	1) Pengukuran kinerja dilakukan melalui etpp untuk setiap jenjang jabatan 2) Laporan pengukuran kinerja secara periodik tertuang dalam evaluasi Perkin secara berkala (triwulan)
5	Melakukan cascading pengukuran kinerja/penyelarasan secara berjenjang dari tingkat pimpinan/ eselon 2 hingga staf	1) Pengukuran kinerja individu dilakukan secara berjenjang sesuai dengan cascading pada MPPH dan SKP dari level eselon 2 sampai dengan staf 2) pengukuran kinerja individu dilakukan melalui sistem etpp, dimana target kinerja individu yang ada di SKP dituangkan ke dalam Renkin etpp, dan dilakukan pengukuran secara berkala (triwulan)
6	Melakukan pengukuran kinerja dan memanfaatkannya untuk penyesuaian strategi dengan melampirkan rencana aksi/strategi setiap kegiatan untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien	1) Pengukuran kinerja capaian organisasi secara berkala (triwulan) melalui emonev dan sistem KSD, terlampir screenshot emonev dan KSD 2) Rencana aksi IKU tertuang dalam Perkin Kepala Dinas 3) Pengukuran dan evaluasi Kinerja secara triwulan dilakukan melalui evaluasi Rencana Kerja, dimana terdapat uraian faktor penghambat dan pendorong yang dijadikan dasar dalam merumuskan strategi tindak lanjut triwulan berikutnya
7	Melakukan sosialisasi mengenai pengukuran kinerja dan melakukan monev secara berkala atas capaian kinerja pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan	1) Telah dilakukan sosialisasi pengukuran kinerja (emonev dan KSD) 2) Monev kinerja pegawai dilakukan berkala setiap bulan/triwulan melalui capaian renkin pada sistem etpp
8	Di masa mendatang agar menampilkan hasil reviu internal dalam penyusunan LKIP dan disampaikan kepada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi secara tepat waktu	1) Telah disusun LAKIP 2023, dan telah dilaporkan melalui sistem KSD B03 2024, dan telah dilaporkan kepada Kementerian PANRB melalui https://esr.menpan.go.id/ 2) Pada proses penyusunan LAKIP 2023 telah melalui reviu internal melalui rapat pembahasan yang dipimpin Sekretaris Dinas

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP
9	Dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar: a) Dilakukan peningkatan pengetahuan para pegawainya terkait implementasi SAKIP; b) Membentuk tim saki internal yang ditetapkan dalam bentuk SK/Surat Tugas dari kepala Perangkat Daerah dan dilakukan pengumpulan dokumen secara berjenjang; c) Dalam evaluasi implementasi SAKIP agar menunjukkan bukti bahwa terdapat peningkatan efisiensi kinerja	1) Dilakukan sosialisasi SAKIP melalui rapat koordinasi tingkat Dinas, serta diklat pegawai yang salah satu materinya terkait akuntabilitas kinerja 2) Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Nomor 84 Tahun 2024 tentang Tim penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 3) Dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 2023 pada BAB III Akuntabilitas Kinerja, subbab 3.6, diuraikan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran berbasis indikator kinerja utama di level Sasaran organisasi (halaman 58)

Atas penyampaian laporan tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP 2023 tersebut, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta kemudian melakukan reviu dan verifikasi serta menuangkan hasil reviu ke dalam Berita Acara TLHE SAKIP 2023. Berdasarkan hasil reviu dan verifikasi yang tertuang dalam Berita Acara, setiap aksi tindak lanjut telah sesuai dengan 9 poin rekomendasi LHE SAKIP 2023. Berita Acara TLHE SAKIP 2023 disajikan pada lampiran 2.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tujuan dan manfaat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, gambaran singkat tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, aspek strategi dan permasalahan utama yang dihadapi, serta sistematika penulisan LKIP Tahun 2024.

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 serta isi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja dan capaian strategis kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 perbandingan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya, analisa faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, realisasi anggaran serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB IV - PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta di tahun 2024 serta saran perbaikan untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN RPD 2023-2026

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. 6 Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025;
2. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
3. 5 Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022;
4. 6 Isu-isu strategis 2023-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut teridentifikasi empat dimensi yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Keempat dimensi tersebut yaitu; dimensi lingkungan bangun (*built environment*), dimensi perekonomian (*economic*), dimensi manusia (*human*), dan dimensi pemerintahan (*governance*). Dimensi lingkungan-bangun adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan ruang fisik kota yang dibangun dalam rangka menyediakan sarana bagi segala kegiatan manusia dalam bertinggal dan berusaha. Dimensi perekonomian merupakan dimensi perencanaan yang menyentuh upayaupaya manusia dalam meningkatkan derajat hidupnya melalui kegiatankegiatan bernilai ekonomi. Dimensi manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan kualitas kehidupan dan interaksi manusia dengan sesama. Sedangkan dimensi pemerintahan adalah dimensi perencanaan yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak warga dalam bertinggal di kota dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif. Keempat dimensi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep RPD yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026.

Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing dimensi kemudian dielaborasi menjadi 4 tujuan dengan 17 sasaran turunannya. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah sebagai berikut:

- Tujuan : Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan
- Sasaran : Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon

Berdasarkan tujuan dan sasaran pada RPD 2023-2026 seperti pada tabel diatas, kemudian dijabarkan pada level tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 2023-2026, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran RPD dan Renstra 2023-2026

Tujuan/Sasaran RPD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target				Kondisi Akhir	
					2023	2024	2025	2026	2026	Akhir
Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	62,6 (2017)	65	66	67	68	68	68
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	18.5 (2022)	19.3	20	20.5	22.3	22.3	22.3
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	54.43 (2021)	54.93	55.43	55.93	56.43	56.43	56.43
	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	26,25	26,75	27,25	27,75	28,25	28,25	28,25
		Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan Ruang Terbuka Hijau Hutan	Persen	73,91	75,58	76,91	78,25	79,58	79,58	79,58
	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	5,176	5,185	5,194	5,203	5,212	5,212	5,212
Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau		Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi	Persen	25	27	30	34	38	38	38

2.2 RENSTRA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang digunakan sebagai dasar penyusunan LKIP adalah Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Untuk periode 2023-2026, karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah, maka daerah tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, oleh karena itu penyusunan Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Hal ini sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Kemudian di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 3/SE/2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Daerah Tahun 2023-2026.

Visi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 adalah “Ibukota NKRI yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”. Visi RPJPD ini kemudian diturunkan ke level tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Adapun salah satu tujuan RPD yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yaitu Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan. Kemudian di tingkat sasaran RPD adalah Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon. Dengan mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026 tersebut, kemudian dijabarkan tujuan dan sasaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk tahun 2023-2026, yaitu:

a. Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota
- 2) Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas

b. Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas, maka sasaran Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan
- 2) Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau

Selanjutnya ditentukan target dari setiap indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2023-2026.

Tabel 4. Target Tujuan Renstra Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
						2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan adalah Nilai yang menggambarkan kualitas lahan dalam suatu wilayah pada waktu tertentu berdasarkan luas tutupan lahan Rumus perhitungan: $IKL = 100 - [(84,3 - (ITL \times 100)) \times \frac{50}{54,3}]$	Nilai	26,25	26,75	27,25	27,75	28,25	28,25
2	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau adalah RTH Taman, Makam, Jalur Hijau dan Hutan. Ditargetkan dilakukan penambahan RTH setiap tahunnya seluas 6 Ha (0,09%) dari hasil pengadaan lahan dan serah terima fasos fasum. Rumus perhitungan = luas total RTH di tahun (n) dibagi luas daratan DKI Jakarta dikali 100% Luas Daratan DKI Jakarta 66.150 Ha atau 661,5 km ²	%	5,176	5,185	5,194	5,203	5,212	5,212

Tabel 5. Target Sasaran Renstra Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
							2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan Ruang Terbuka Hijau Hutan	Persentase luas hutan dibawah pengelolaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang telah dilakukan pembangunan/penataan/ penghijauan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas hutan. Adapun keseluruhan luas lahan hutan yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah 299,72 Ha. Rumus perhitungan : Luas pembangunan/ penataan/penghijauan hutan dibagi Luas hutan yang dikelola Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dikali 100%	%	73,91	75,58	76,91	78,25	79,58	79,58
2	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi	Infrastruktur hijau-biru terintegrasi adalah penyediaan sumur resapan/bioswale/kolam retensi/rain garden/embung pada lahan ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Rumus perhitungan = jumlah kelurahan yang memiliki infrastruktur hijau-biru dibagi jumlah total kelurahan di 5 wilayah DKI Jakarta (262 kelurahan) dikali 100%.	%	25	27	30	34	38	38

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkanlah Indikator Utama (IKU) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Berikut target capaian IKU Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2023-2026:

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama 2023-2026

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target Kinerja				Definisi Operasional
				2023	2024	2025	2026	
1	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	5,185	5,194	5,203	5,212	Ruang Terbuka Hijau adalah ruang terbuka hijau Taman, Makam, Jalur Hijau dan Hutan. Ditargetkan dilakukan penambahan RTH setiap tahunnya seluas 6 Ha (0,009%) dari hasil pengadaan lahan dan serah terima fasos fasum.
2	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	26,75	27,25	27,75	28,25	Indeks Kualitas Lahan adalah Nilai yang menggambarkan kualitas lahan dalam suatu wilayah pada waktu tertentu berdasarkan luas tutupan lahan.
3	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase wilayah kelurahan dengan infrastruktur hijau - biru terintegrasi	Persen	27	30	34	38	Infrastruktur hijau-biru terintegrasi adalah penyediaan sumur resapan/bioswale/kolam retensi/rain garden/embung pada lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.
4	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan	Persen	75,58	76,91	78,25	79,58	Persentase luas hutan dibawah pengelolaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang telah dilakukan pembangunan/penataan/ penghijauan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas hutan.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Eselon II tahun 2024, terdiri atas sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional. Perkin tersebut ditandatangani bersama antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENYESUAIAN TARGET KINERJA PADA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendorong ketercapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2023 oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di mana masih terdapat penetapan Target Kinerja Tahun berjalan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi Target Kinerja Tahun sebelumnya, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

5. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk

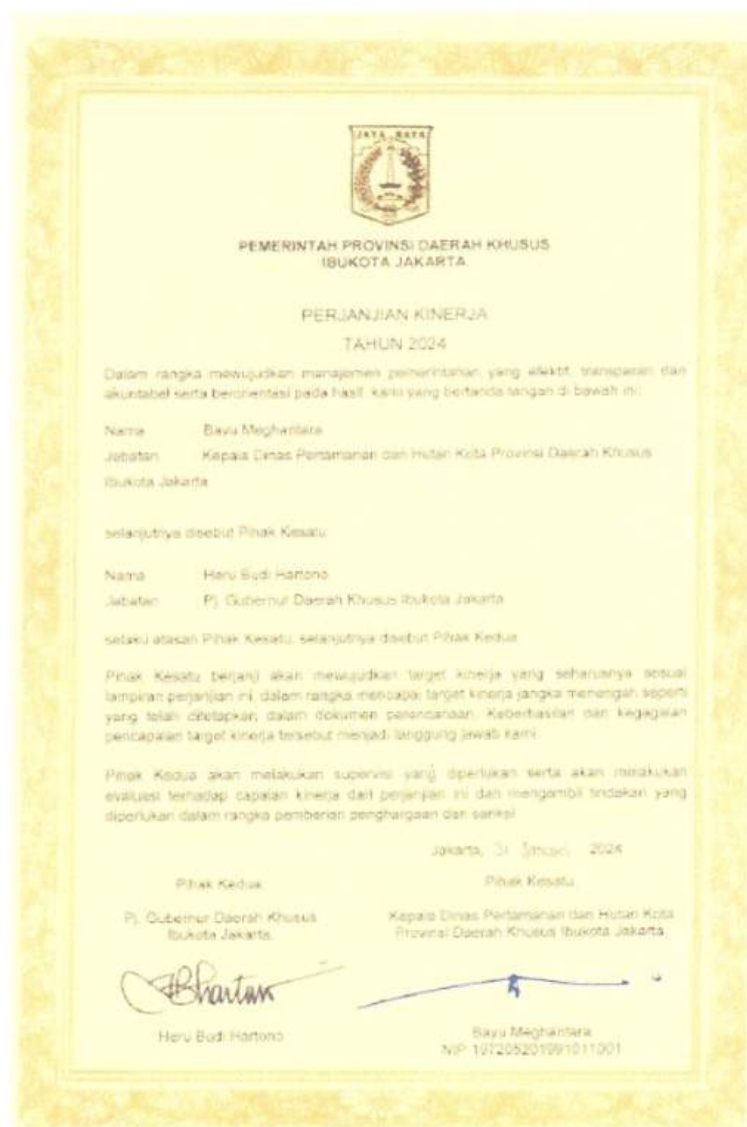
KESATU

Melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Gambar 5. Instruksi Sekda Nomor 19 Tahun 2024

Untuk Perkin tahun 2024, terdapat penyesuaian target kinerja sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 19 tahun 2014 tentang Penyesuaian Kinerja Tahun 2024. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2024:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 18



Gambar 6. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 2024

Gambar 7. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Satuan	Target
Sasaran Strategis					
1	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Persentase Ruang Terbuka Hijau	e-SAKIP	Persen	5,2155
2	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Indeks Kualitas Lahan	e-SAKIP	Nilai	27,25
3	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase wilayah kelurahan dengan infrastruktur hijau - biru terintegrasi	e-SAKIP	Persen	30
4	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan	e-SAKIP	Persen	76,91
Sasaran Khusus					
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Persen	100
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Nilai	3,25
7	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Persen	100
8	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Persen	80
9	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Persen	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Satuan	Target
10	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Persen	100
11	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Persen	100
12	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Persen	71
Sasaran Operasional					
13	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Persen	100
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Persen	100
15	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	Indeks	88,6
16	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Persen	100

Berkaitan dengan penganggaran di tahun 2024, berikut pagu anggaran yang ditetapkan di awal tahun dan pagu perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Pagu Anggaran Tahun 2024

Kode	Program	PAGU ANGGARAN	
		Pagu Awal (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHAYATI)	142.021.356	142.021.356
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	588.914.786	588.914.786
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	348.131.101	348.131.101
3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	30.056.130.246	30.081.330.204
3.28.05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	884.801.728.266	888.561.800.366
3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	386.789.156.188	375.842.554.668
	Total	1.302.726.081.943	1.295.564.752.481

Tabel 8. Program, Kegiatan dan subkegiatan pendukung indikator kinerja

Tujuan/Sasaran	Indikator	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
PENINGKATAN TUTUPAN LAHAN MELALUI PERLUASAN RUANG TERBUKA HIJAU HUTAN KOTA	Indeks Lahan	Kualitas		
PENINGKATAN KUALITAS LAHAN DAN HUTAN	Persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan	PROGRAM SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	1. Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
			1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
			2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan
			3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
			4. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Provinsi	4. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			5. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Provinsi	5. Penyusunan dan Penetapan Rencana Daerah Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
			6. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
			7. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	7. Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan
			8. Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	8. Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara
			9. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Tujuan/Sasaran	Indikator	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			6. Administrasi Daerah	10. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			7. Administrasi Umum Perangkat Daerah	11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				13. Penyediaan Bahan/Material
				14. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				15. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				16. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
			9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22. Pengadaan Alat Besar
				23. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				24. Pengadaan Mebel
				25. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			10. Peningkatan Pelayanan BLUD	26. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
			11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				28. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tujuan/Sasaran	Indikator	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
PENYEDIAAN RUANG TERBUKA DAN INFRASTRUKTUR HIJAU YANG INKLUSIF DAN BERKUALITAS	Persentase Ruang Terbuka Hijau	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	12. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				30. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			13. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	31. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
				32. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

Pada bab ini akan dijabarkan realisasi target dan analisa pencapaian dari indikator kinerja Eselon II pada tahun 2024. Berikut adalah realisasi kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 secara keseluruhan:

Tabel 9. Capaian Kinerja Organisasi 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Satuan	Target	Realisasi	Ket
Sasaran Strategis							
1	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Persentase Ruang Terbuka Hijau	e-SAKIP	Persen	5,2155	5,357	Tercapai
2	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Indeks Kualitas Lahan	e-SAKIP	Nilai	27,25	27,49	Tercapai
3	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase wilayah kelurahan dengan infrastruktur hijau - biru terintegrasi	e-SAKIP	Persen	30	30,34	Tercapai
4	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan	e-SAKIP	Persen	76,91	77,09	Tercapai
Sasaran Khusus							
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Persen	100	100	Tercapai
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Nilai	3,25	100	Tercapai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Satuan	Target	Realisasi	Ket
7	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Persen	100	100	Tercapai
8	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Persen	80	96,05	Tercapai
9	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Persen	100	100	Tercapai
10	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Persen	100	100	Tercapai
11	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Persen	100	100	Tercapai
12	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Persen	71	90,87	Tercapai
Sasaran Operasional							
13	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Persen	100	100	Tercapai
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Persen	100	89	Tidak Tercapai
15	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	Indeks	88,6	91,1	Tercapai
16	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Persen	100	49,76	Tidak Tercapai

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan dari 16 indikator yang diampu oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, indikator yang tercapai sesuai target sebanyak 14 indikator, sementara yang tidak tercapai sebanyak 2 indikator yaitu indikator Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat dan indikator Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) . Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 11 berikut:

Tabel 10. Rekapitulasi Kinerja Organisasi Tahun 2024

No	Kelompok Sasaran	Jumlah indikator	Tercapai	Tidak Tercapai
1	Sasaran Strategis	4	4	0
2	Sasaran Khusus	8	8	0
3	Sasaran Operasional	4	2	2
Total		16	14	2

Selanjutnya, akan dijelaskan secara lebih mendetail terkait capaian dari masing-masing target kinerja pada sub bab berikut.

3.2 CAPAIAN STRATEGIS KINERJA

3.2.1 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Kelompok sasaran strategis terdiri atas indikator tujuan dan sasaran organisasi yang termuat dalam Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 serta Rencana Kerja tahun 2024. Pada tabel 12 dibawah disajikan capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas di tahun 2024:

Tabel 11. Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target (2024)	Realisasi (2024)	Capaian	Target akhir Renstra
1	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Persentase Ruang Terbuka Hijau	5,2155%	5,357%	102,71 %	5,212 %
2	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Indeks Kualitas Lahan	27,25	27,49	100,88 %	28,25 %
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2024)	Realisasi (2024)	Capaian	Target akhir Renstra
3	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan Ruang Terbuka Hijau Hutan	76,91%	77,09%	100,23 %	79,58 %
4	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi	30%	30,34%	101,13 %	38 %

Kepulauan Seribu sebesar 90,01. Berikut adalah capaian IKTL masing-masing kota/kabupaten administrasi:

Tabel 13. Sebaran Capaian Indeks Kualitas Lahan Berdasarkan Wilayah

Kabupaten/ Kota	Kab Adm. Kepulauan Seribu	Kota Jakarta Barat	Kota Jakarta Selatan	Kota Jakarta Pusat	Kota Jakarta Timur	Kota Jakarta Utara	Provinsi DKI Jakarta
Nilai IKTL	90,01	24,37	26,25	27,64	26,92	26,65	27,49

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Provinsi DKI Jakarta telah berada 0,24 point diatas target nilai IKL tahun 2024, yakni sebesar 27,49.



Gambar 8. Trend Capaian Nilai IKTL Provinsi DKI Jakarta 2021-2024

Apabila melihat perkembangan nilai IKTL tahunan sebagaimana disajikan pada grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2021 sampai dengan 2024, indeks IKTL mengalami trend kenaikan yang stabil, hingga pada tahun 2024 didapatkan nilai 27,49. Peningkatan nilai IKTL didapatkan dari meningkatnya luas kelas tutupan lahan sebagai dasar penetapan nilai vegetasi non-hutan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercapainya target tutupan lahan pada tahun 2024 mencerminkan keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemetaan penggunaan lahan termutakhir dalam skala yang detil 1:5.000 sehingga dapat teridentifikasi area bervegetasi dalam penggunaan lahan RTH yang berukuran kecil seperti vegetasi di median jalan, pulau-pulau jalan dan jalur pejalan kaki. Di samping itu, beberapa taman kota yang mengalami pembangunan dan penataan serta pelaksanaan penanaman pohon yang rutin dilakukan setiap tahun juga turut berperan dalam bertambahnya area bervegetasi. Beberapa usaha yang telah dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui instansi terkait untuk memperbaiki nilai IKTL antara lain:

- a) Dari sisi kebijakan, Provinsi DKI Jakarta telah memiliki Peraturan Gubernur Jakarta No. 31 tahun 2022 tentang Rencana Detil Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta, sebagai peraturan turunan dari Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan

- luas area RTH, diharapkan implementasi pembangunan wilayah mengikuti aturan tersebut, dan pengawasan terhadap implementasi RDTR WP secara konsisten oleh seluruh pihak terkait
- b) Terlaksananya kegiatan penanaman/penghijauan sepanjang tahun 2024 dengan melakukan penanaman bibit mangrove sebanyak 51.188 bibit, penanaman pohon sebanyak 39.828 jenis pohon pelindung dan pohon produktif, serta penanaman tanaman hias sebanyak 5.477.680 tanaman di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 14. Penanaman/penghijauan Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah		
		Pohon	Tanaman	Mangrove
Oleh Bidang, Suku Dinas Dan Upt Dari Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota				
1	Bidang Pertamanan	251	6.400	0
2	Bidang Jalur Hijau	1.563	102.900	0
3	Bidang Kehutanan	1.897	8.460	51.188
4	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Jakarta Pusat	903	1.130.097	0
5	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Jakarta Utara	2.252	1.140.881	0
6	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Jakarta Barat	3.362	245.904	0
7	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Jakarta Selatan	2.544	599.416	0
8	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Jakarta Timur	2.943	2.019.667	0
9	Up Taman Margasatwa Ragunan	340	32.701	0
Subtotal		16.055	5.286.426	51.188
Oleh Wilayah Kota Administrasi / Kabupaten				
1	Jakarta Pusat	324	124	0
2	Jakarta Utara	2.291	2.216	0
3	Jakarta Barat	5.945	25.171	0
4	Jakarta Selatan	2.542	60.047	0
5	Jakarta Timur	12.671	103.696	0
6	Kepulauan Seribu	0	0	0
Subtotal		23.773	191.254	0
Total Penanaman Keseluruhan		39.828	5.477.680	51.188

- c) Melakukan updating atau pemutakhiran data spasial penggunaan tanah skala detil 1:5.000, sehingga teridentifikasi area bervegetasi yang berukuran sempit seperti vegetasi di median jalan, pulau-pulau jalan dan jalur pejalan kaki.
- d) Melaksanakan pembangunan 10 taman, 3 hutan kota dan 1 TPU dengan total luasan 48.347 m2, yang tersebar di tiga wilayah Kota Administrasi Jakarta. Di Jakarta Selatan terdapat tujuh lokasi dengan total luas sebesar 16.501 m2, Jakarta Timur memiliki 6 lokasi dengan area seluas 29.109 m2, serta Jakarta Utara sebanyak 1 lokasi dengan luas mencapai 2.737 m2. Rincian lokasi pembangunan RTH TA 2024, disajikan pada tabel dibawah:

Tabel 15. Pembangunan Taman, Hutan, Makam TA 2024

NO	JENIS PEKERJAAN	NAMA TAMAN	LOKASI	WILAYAH	LUAS (m2)
1	Pembangunan RTH Taman	Taman Haji Niman	RTH Taman Jl. Lebak Bulus V Kelurahan Cilandak Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	1.684
2	Pembangunan RTH Taman	Taman Melati	RTH Taman AUP Kelurahan Jatipadang Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	1.941
3	Pembangunan RTH Taman	Taman Pulo Gadel Indah	RTH Taman Pinang Ranti Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar, Jakarta Timur	Jakarta Timur	4.167
4	Pembangunan RTH Taman	RTH Kebantenan	Jl. Kebantenan V , Semper Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara	Jakarta Utara	2.737
5	Pembangunan RTH Taman	Taman Kampung Kerukunan	Jalan Reformasi (Jalan Swadarma I Dalam) Blok A RT 001, RW 009, Petukangan Utara, Pesanggrahan	Jakarta Selatan	1.058
6	Pembangunan RTH Taman	Taman Kasaba Marsela One	Jl. Tebet Dalam 1 No.8, RT.1/RW.1, Manggarai Sel., Kec. Tebet	Jakarta Selatan	240
7	Pembangunan RTH Taman	Taman Rawa Bambu Pasar Minggu	Jl. Rawa Bambu RT 013 RW 05, kel. Pasar Minggu, Pasar Minggu	Jakarta Selatan	562
8	Pembangunan RTH Taman	RTH Jl. Margasatwa 1	Jl. Margasatwa 1, RT 001/ RW 07, Cilandak Timur, Pasar Minggu	Jakarta Selatan	5.000
9	Pembangunan RTH Taman	Taman Setu Biru	Jalan Kampung Setu RT 007 RW 004 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung -Jakarta Timur	Jakarta Timur	4.200
10	Pembangunan RTH Taman	Taman Harendong	Jl. Swadaya IV RT 006 RW 002 Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung -Jakarta Timur	Jakarta Timur	2.552
11	Pembangunan RTH Hutan	Hutan Kota Pinang II	Jl. Pinang 2, RT.009 RW.003 Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	6.016
12	Pembangunan RTH Hutan	Hutan Kota Sawo Kecik	Jl. Sawo Kecik Kel. Pulogebang, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur	Jakarta Timur	5.200
13	Pembangunan RTH Hutan	Hutan Kota Satria	Jl. Menteng Niaga, Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur	Jakarta Timur	7.700
14	Pembangunan RTH Makam	TPU Radjiman	Jl. Inspeksi Kali Petukangan, RT 15/04, Kelurahan Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur	Jakarta Timur	5.290
TOTAL					48.347

- e) Melakukan penataan RTH Taman, Hutan Kota dan Pemakaman sebanyak 24 lokasi, yang dilakukan oleh Bidang dan Suku Dinas di lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Penataan dilakukan selain untuk peningkatan kualitas RTH melalui perbaikan sarana

prasarana dan perbaikan vegetasi, juga untuk peningkatan pemberian layanan kepada masyarakat melalui penyediaan lingkungan RTH yang nyaman. Untuk rincian lokasi penataan RTH, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 16. Penataan RTH Taman, Hutan dan makam TA 2024

No	LOKASI	Jenis RTH	SKPD/UKPD
1	Penataan RTH Jalur Hijau Simpang Slipi, Jakarta Barat	RTH Jalur Hijau	Bidang Jalur Hijau
2	Penataan Kawasan Kampung Royal, Penjaringan, Jakarta Utara	RTH Jalur Hijau	
3	Penataan Hutan Cipayung, Jl. Ali, RT.7/RW.1, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	RTH Hutan Kota	Bidang Kehutanan
4	Penataan Hutan Munjul Jl Raya Munjul RT.2/RW.1, Kel. Munjul, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	RTH Hutan Kota	
5	Penataan RTH Makam TPU Rorotan, Jakarta Utara	RTH Makam	Bidang Pemakaman
6	Penataan RTH Makam di Provinsi DKI Jakarta (TPU Semper)	RTH Makam	
7	Penataan RTH Makam Wilayah Jakarta Pusat (TPU Petamburan, Jakarta Pusat)	RTH Makam	
8	Penataan RTH Makam TPU Bambu Apus, Jakarta Timur	RTH Makam	
9	Penataan RTH Makam TPU Cipayung, Jakarta Timur	RTH Makam	
10	Penataan Kantor TPU di Wilayah DKI Jakarta (TPU Munjul, TPU Utan Kayu, dan TPU Jembatan Sampi)	RTH Makam	
11	Penataan RTH Makam Wilayah Jakarta Barat (tpu grogol kemanggisan)	RTH Makam	
12	Penataan RTH Makam Wilayah Jakarta Timur (TPU Penggilingan Layur)	RTH Makam	
13	Perbaikan Sarana dan Prasarana RTH Makam di Wilayah DKI Jakarta (TPU Menteng pulo dan TPU Pondok Kelapa)	RTH Makam	
14	Penataan Taman Kwista	RTH Taman	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Jakarta Pusat
15	Penataan FO Slipi Skatepark, Jl Palmerah Selatan, Tanah Abang, Gelora, Tanah Abang	RTH Jalur Hijau	
16	Penataan TPU di Wilayah Jakarta Pusat	RTH Makam	
17	Taman Gang CC kecamatan Koja	RTH Taman	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Jakarta Utara
18	Jl Tanjung Duren III E, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat	RTH Taman	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Jakarta Barat
19	Jl. Samping Kosambi Baru RW.09 Dan RW.10, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat	RTH Taman	
20	Penataan RTH Kupingan Pemuda, Kel. Rawamangun Kota Administrasi Jakarta Timur	RTH Jalur Hijau	Suku Dinas Pertamanan Dan

No	LOKASI	Jenis RTH	SKPD/UKPD
			Hutan Kota Jakarta Timur
21	Penataan Saluran Air TMR Uditch 40x60 + Tutup	RTH TMR	Up Taman Margasatwa Ragunan
22	Jalan Lingkungan TMR	RTH TMR	
23	Turap Kandang Peragaan Satwa TMR (Kandang Harimau 5)	RTH TMR	
24	Pembangunan Locket Utara TMR 2 dan 3	RTH TMR	

- f) Perbaiki pengelolaan data RTH dengan mengaplikasikan Sistem Semarak Hijau sebagai sistem pengolahan data RTH di Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi proses penginputan dan validasi data RTH serta sinkronisasi dengan Sistem Jakarta Satu untuk penyajian data RTH final. Adanya sistem Semarak Hijau ini membuat proses pengelolaan data RTH menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat menghasilkan data yang akurat, dengan optimalisasi tugas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota selaku produsen data RTH melalui proses validasi data spasial.

Faktor pendorong yang mempengaruhi capaian IKL di tahun 2024 ini antara lain sebagai berikut:

- a) Optimalisasi penambahan aset lahan melalui serah terima fasos dan fasum
- b) Meningkatkan penanaman vegetasi mangrove pada hutan produksi dan hutan lindung
- c) Menggalakkan kembali program penanaman pohon di tiap wilayah administrasi dengan melibatkan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- d) Meningkatkan kerjasama penghijauan dengan pihak swasta melalui skema CSR (Corporate Social Responsibility)
- e) Melakukan updating poligon vegetasi hutan dan non hutan pada peta penggunaan lahan skala 1:5000 dengan menggunakan bantuan citra tegak satelit resolusi tinggi.
- f) Melakukan pemeliharaan RTH publik dengan menambah jenis tanaman keras yang kuat agar lebih tahan terhadap angin kencang
- g) Perbaiki pengelolaan data RTH dengan mengaplikasikan Sistem Semarak Hijau sebagai sistem pengolahan data RTH di Provinsi DKI Jakarta.

IKL sebagai komponen dari IKLH telah dijadikan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Mempertimbangkan RPJMD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka IKLH sebagai indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah juga menjadi salah satu indikator yang ditargetkan dalam dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. IKLH yang tertuang dalam RPD 2023-2026 tersebut kemudian dijabarkan dan diturunkan menjadi indikator kinerja Dinas berupa IKL yang tertuang dalam Renstra Dinas 2023-2026.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.4/MenLHK/Setjen/Kum.1 /4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, target IKL Tahun 2023 dan 2024 secara nasional berturut-turut meningkat. Target Provinsi sebagaimana tertuang dalam Renstra 2023-2026, memiliki target yang lebih tinggi dari target Nasional (tabel berikut) .

Tabel 17. Perbandingan Capaian IKTL Dengan Target Nasional, Renstra, Renja dan Perkin

Target/Realisasi Kinerja	2023	2024
Target Nasional (SE MenLHK No SE.4/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2021	25,13	25,23
Target Renstra	26,75	27,25
Target Renja	26,75	27,25
Target Perkin	26,75	27,25
Realisasi	27,17	27,49

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa IKL Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 selalu mencapai target, baik dari target secara nasional berdasarkan SE Menteri LHK maupun target Provinsi sesuai Renstra 2023-2026. Diharapkan nilai IKL Provinsi DKI Jakarta akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Untuk realisasi IKL di daerah provinsi lainnya secara nasional untuk tahun 2024, belum bisa diinformasikan disini karena datanya belum ada dari Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga capaian IKL Provinsi DKI Jakarta belum dapat dibandingkan dengan kinerja Provinsi lainnya.

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja 2024, dirumuskan rencana aksi pada indikator Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Tutupan Lahan melalui Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota
- 2) Meningkatkan dan/atau Mempertahankan Kualitas dan/atau Kuantitas Tutupan Lahan melalui Pemeliharaan Hutan Kota

b. Tujuan 2: Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas

Dalam rangka pencapaian tujuan pertama yaitu Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas dapat diukur dengan indikator kinerja berupa Persentase Ruang Terbuka Hijau. Indikator ini merupakan indikator tujuan yang tertuang pada Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 2023-2026. Adapun untuk target dan realisasi capaian pada tahun 2024 dari indikator ini disajikan pada tabel dibawah.

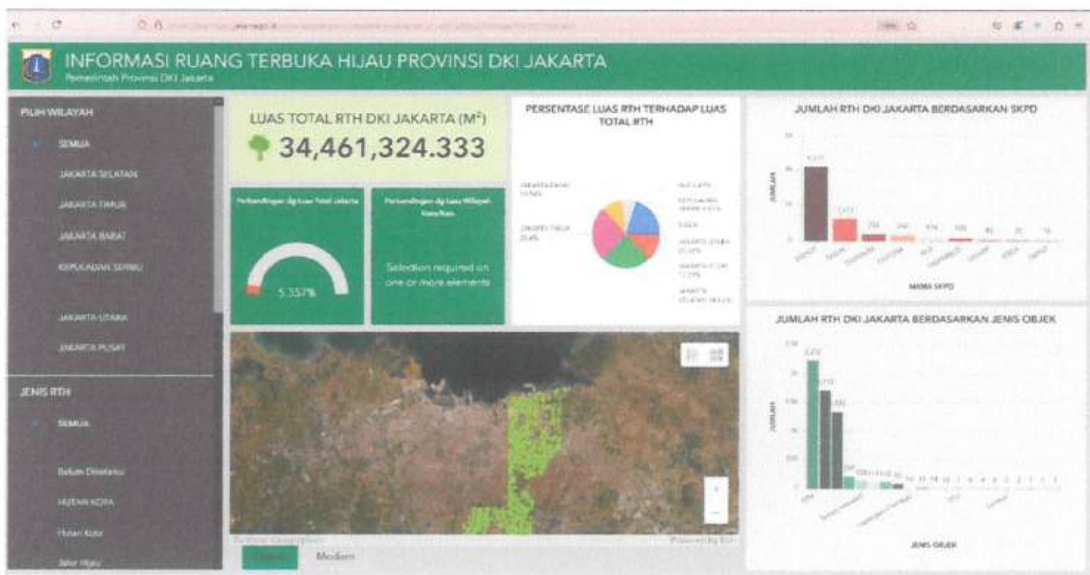
Tabel 18. Capaian Indikator persentase Ruang Terbuka Hijau

Tujuan	Indikator kinerja	Target/Realisasi Kinerja	2023	2024
Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Target Renstra	5,185	5,194
		Target Renja	5,185	5,2155
		Target Perkin	5,185	5,2155
		Realisasi	5,214	5,357
		Capaian dibanding target Perkin	100,6%	102,71%

Terdapat penyesuaian target kinerja Renstra pada target Renja dan Perkin dikarenakan realisasi pada tahun 2023 (5,214) sudah melebihi target kinerja 2024 pada Renstra (5,194). Target kinerja pada Renja dan Perkin tahun 2024 disesuaikan menjadi 5,2155.

Penambahan luasan RTH didapatkan melalui pengadaan lahan dari APBD dan serah terima fasos dan fasum dari BPAD. Namun pada tahun 2024, terdapat kebijakan untuk tidak ada pengadaan lahan melalui APBD dan lebih mengoptimalkan serah terima lahan fasos fasum dari BPAD. Sesuai dengan Renstra 2023-2026, setiap tahunnya ditargetkan dilakukan penambahan RTH seluas 6 Ha (0,009%). Rumus perhitungannya : luas total RTH di tahun (n) dibagi luas daratan DKI Jakarta dikali 100%. (Luas Daratan DKI Jakarta 66.150 Ha atau 661,5 km²). Data penambahan luasan RTH ini kemudian dilakukan penginputan data kedalam sistem Sistem Semarak Hijau (<https://distamhut.jakarta.go.id/semarakhijau>), dilakukan validasi data dan sinkronisasi data RTH spasial ke dalam Sistem Jakarta Satu (<https://jakartasatu.jakarta.go.id/>) sebagai sistem penyajian data publik yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2024, untuk indikator persentase RTH telah tercapai melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, dari target 5,2155% telah terealisasi sebesar 5,357% atau dengan capaian 102,71%. Realisasi dari penambahan luasan RTH ini didapatkan dari serah terima fasos fasum dari BPAD. Pada tahun 2024, telah dilakukan serah terima aset untuk Ruang Terbuka Hijau dari BPAD kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebanyak 100 bidang tanah dengan total luas 195.250 m² senilai Rp. 1.921.621.867.450,- , dengan rincian sebagaimana tabel dibawah. Dengan penambahan ini maka persentase Ruang Terbuka Hijau DKI Jakarta sampai akhir tahun 2024 tercapai sebesar 5,357%, sesuai dengan data resmi yang di rilis melalui www.jakartasatu.go.id.



Gambar 9. Prosentase RTH Publik di Jakarta satu

Berikut daftar lahan fasos fasum yang diserah terimakan dari BPAD kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Tabel 19. Daftar Aset dari Serah Terima Fasos Fasum Tahun 2024

NO	PENGEMBANG	JALAN	KELURAHAN	KECAMATAN	WILAYAH	Luas	RUPIAH
1	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	1101 m ²	14.450.625.000
2	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	756 m ²	9.922.500.000
3	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	3463 m ²	45.451.875.000
4	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	1756 m ²	23.047.500.000
5	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	1543 m ²	20.251.875.000
6	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	448 m ²	5.880.000.000
7	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	147 m ²	1.929.375.000
8	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	868 m ²	11.392.500.000
9	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	713 m ²	9.358.125.000
10	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	1127 m ²	14.791.875.000
11	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	1112 m ²	14.595.000.000
12	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	1124 m ²	14.752.500.000
13	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	1106 m ²	14.516.250.000
14	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	1704 m ²	22.365.000.000
15	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	11977 m ²	157.198.125.000
16	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	275 m ²	3.609.375.000
17	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	384 m ²	5.040.000.000
18	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	360 m ²	4.725.000.000
19	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	1842 m ²	24.176.250.000
20	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	1152 m ²	15.120.000.000
21	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	2943 m ²	38.626.875.000

NO	PENGEMBANG	JALAN	KELURAHAN	KECAMATAN	WILAYAH	Luas	RUPIAH
22	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	1510 m ²	19.818.750.000
23	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	163 m ²	2.139.375.000
24	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	298 m ²	3.911.250.000
25	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	491 m ²	6.444.375.000
26	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Komplek Perumahan Green Garden	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	3237 m ²	42.485.625.000
27	PT. Metropolitan Development		Duri Kosambi	Cengkareng	Jakarta Barat	4305 m ²	29.975.715.000
28	PT. Metropolitan Development		Duri Kosambi	Cengkareng	Jakarta Barat	7377 m ²	51.366.051.000
29	PT. Metropolitan Development		Duri Kosambi	Cengkareng	Jakarta Barat	638 m ²	4.442.394.000
30	PT. Metropolitan Development		Duri Kosambi	Cengkareng	Jakarta Barat	1643 m ²	11.440.209.000
31	PT. Metropolitan Development		Duri Kosambi	Cengkareng	Jakarta Barat	4906 m ²	47.318.370.000
32	PT. Metropolitan Development		Duri Kosambi	Cengkareng	Jakarta Barat	643 m ²	6.201.735.000
33	PT. Metropolitan Development	Jalan Ciledug Raya	Duri Kosambi	Cengkareng	Jakarta Barat	70241 m ²	6.774.744.450
37	PT. Selaras Mitra Sejati	Jalan Ciledug Raya	Cipulir	Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	220 m ²	3.613.060.000
38	PT. Selaras Mitra Sejati	Jalan Ciledug Raya	Cipulir	Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	14 m ²	229.922.000
39	PT. Selaras Mitra Sejati	Jalan Ciledug Raya	Cipulir	Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	63 m ²	1.034.649.000
40	PT. Selaras Mitra Sejati	Jalan Ciledug Raya	Cipulir	Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	24 m ²	394.152.000
41	PT. Selaras Mitra Sejati	Jalan Ciledug Raya	Cipulir	Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	1727 m ²	28.362.521.000
42	PT. Selaras Mitra Sejati	Jalan Ciledug Raya	Cipulir	Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	238 m ²	3.908.674.000
43	PT. Selaras Mitra Sejati	Jalan Ciledug Raya	Cipulir	Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	101 m ²	1.658.723.000
44	PT. Selaras Mitra Sejati	Jalan Ciledug Raya	Cipulir	Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	466 m ²	7.653.118.000
45	PT. Selaras Mitra Sejati	Jalan Ciledug Raya (	Cipulir	Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	117 m ²	1.921.491.000
46	PT. Selaras Mitra Sejati	Jalan Lingkar Luar Kamal Raya dan Jalan Kamal Outer Ring Road	Cipulir	Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	105 m ²	1.724.415.000

NO	PENGEMBANG	JALAN	KELURAHAN	KECAMATAN	WILAYAH	Luas	RUPIAH
47	PT. Cakra Bina Lestari	Jalan Lingkar Luar Kamal Raya dan Jalan Kamal Outer Ring Road	Cengkareng Barat	Cengkareng	Jakarta Barat	1200 m ²	16.914.000.000
48	PT. Binakarya Cipta Indah	Jalan Lingkar Luar Kamal Raya dan Jalan Kamal Outer Ring Road	Cengkareng Barat	Cengkareng	Jakarta Barat	1304 m ²	18.379.880.000
49	PT. Binakarya Cipta Indah	Komplek Perumahan Taman Permata Buana	Cengkareng Barat	Cengkareng	Jakarta Barat	1653 m ²	23.299.035.000
50	PT. Kembangan Permai Development	Komplek Perumahan Taman Permata Buana	Kembangan Utara	Kembangan	Jakarta Barat	232 m ²	3.747.960.000
51	PT. Kembangan Permai Development	Komplek Perumahan Taman Permata Buana	Kembangan Utara	Kembangan	Jakarta Barat	624 m ²	10.080.720.000
52	PT. Kembangan Permai Development	Komplek Perumahan Taman Permata Buana	Kembangan Utara	Kembangan	Jakarta Barat	419 m ²	6.768.945.000
53	PT. Kembangan Permai Development	Komplek Perumahan Taman Permata Buana	Kembangan Utara	Kembangan	Jakarta Barat	409 m ²	6.607.395.000
54	PT. Kembangan Permai Development	Komplek Perumahan Taman Permata Buana	Kembangan Utara	Kembangan	Jakarta Barat	316 m ²	5.104.980.000
55	PT. Kembangan Permai Development	Komplek Perumahan Taman Permata Buana	Kembangan Utara	Kembangan	Jakarta Barat	727 m ²	11.744.685.000
56	PT. Kembangan Permai Development	Komplek Perumahan Taman Permata Buana	Kembangan Utara	Kembangan	Jakarta Barat	113 m ²	1.825.515.000
57	PT. Kembangan Permai Development	Komplek Perumahan Taman Permata Buana	Kembangan Utara	Kembangan	Jakarta Barat	66 m ²	1.066.230.000
58	PT. Kembangan Permai Development	Komplek Perumahan Taman Permata Buana	Kembangan Utara	Kembangan	Jakarta Barat	113 m ²	1.825.515.000
59	PT. Kembangan Permai Development	Komplek Perumahan Taman Permata Buana	Kembangan Utara	Kembangan	Jakarta Barat	81 m ²	1.308.555.000
60	PT. Kembangan Permai Development	Komplek Perumahan Taman Permata Buana	Kembangan Utara	Kembangan	Jakarta Barat	12 m ²	193.860.000
61	PT. Kembangan Permai Development	Komplek Perumahan Taman Permata Buana	Kembangan Utara	Kembangan	Jakarta Barat	54 m ²	872.370.000
62	PT. Kembangan Permai Development	Komplek Perumahan Taman Permata Buana	Kembangan Utara	Kembangan	Jakarta Barat	40 m ²	646.200.000

NO	PENGEMBANG	JALAN	KELURAHAN	KECAMATAN	WILAYAH	Luas	RUPIAH
63	PT. Kembangan Permai Development	Jalan Garuda Nomor 25 dan 27	Kembangan Utara	Kembangan	Jakarta Barat	35 m ²	565.425.000
64	Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa	Jalan Raya Pegangsaan	Gunung Sahari Selatan	Kemayoran	Jakarta Pusat	369 m ²	9.211.347.000
65	PT. Citra Abadi Mandiri	Jalan Raya Pegangsaan	Rawa Terate	Cakung	Jakarta Timur	4.574 m ²	84.047.250.000
66	PT. Citra Abadi Mandiri	Jalan Mayjen Sutoyo (	Rawa Terate	Cakung	Jakarta Timur	24.724 m ²	454.303.500.000
67	Yayasan Universitas Kristen Indonesia	Jalan Muria Dalam Raya	Cawang	Kramat Jati	Jakarta Timur	2537 m ²	59.931.551.000
68	PT. Bumi Daya Makmur	Jalan Muria Dalam Raya	Menteng Atas	Setiabudi	Jakarta Selatan	456 m ²	23.640.408.000
69	PT. Bumi Daya Makmur	Jalan Patal Senayan 1	Menteng Atas	Setiabudi	Jakarta Selatan	803 m ²	41.629.929.000
70	PT. Indo Sandang City qq PT. Sinjaya	Jalan Permata Regency	Grogol Utara	Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	6485 m ²	206.709.375.000
71	PT. Kedaung Propertindo	Jalan Permata Regency	Srengseng	Kembangan	Jakarta Barat	349 m ²	3.097.375.000
72	PT. Kedaung Propertindo	Jalan Permata Regency	Srengseng	Kembangan	Jakarta Barat	37 m ²	328.375.000
73	PT. Kedaung Propertindo	Jalan Permata Regency	Srengseng	Kembangan	Jakarta Barat	876 m ²	7.774.500.000
74	PT. Kedaung Propertindo	Jalan Permata Regency	Srengseng	Kembangan	Jakarta Barat	58 m ²	514.750.000
75	PT. Kedaung Propertindo	Jalan Permata Regency	Srengseng	Kembangan	Jakarta Barat	128 m ²	1.136.000.000
76	PT. Kedaung Propertindo	Jalan Permata Regency	Srengseng	Kembangan	Jakarta Barat	1592 m ²	14.129.000.000
77	PT. Kedaung Propertindo	Jalan Permata Regency	Srengseng	Kembangan	Jakarta Barat	402 m ²	3.567.750.000
78	PT. Kedaung Propertindo	Jalan Permata Regency	Srengseng	Kembangan	Jakarta Barat	377 m ²	3.345.875.000
79	PT. Kedaung Propertindo	Jalan Permata Regency	Srengseng	Kembangan	Jakarta Barat	1552 m ²	13.774.000.000
80	PT. Kedaung Propertindo	Jalan Permata Regency	Srengseng	Kembangan	Jakarta Barat	46 m ²	408.250.000
81	PT. Kedaung Propertindo	Jalan Permata Regency	Srengseng	Kembangan	Jakarta Barat	47 m ²	417.125.000
82	PT. Kedaung Propertindo	Jalan Permata Regency	Srengseng	Kembangan	Jakarta Barat	196 m ²	1.739.500.000
83	PT. Kedaung Propertindo	Jalan Permata Regency	Srengseng	Kembangan	Jakarta Barat	403 m ²	3.576.625.000

NO	PENGEMBANG	JALAN	KELURAHAN	KECAMATAN	WILAYAH	Luas	RUPIAH
84	PT. Kedaung Propertindo	Jalan Permata Regency	Srengseng	Kembangan	Jakarta Barat	371 m ²	3.292.625.000
85	PT. Kedaung Propertindo	Jalan Permata Regency	Srengseng	Kembangan	Jakarta Barat	22 m ²	195.250.000
86	PT. Kedaung Propertindo	Jalan Permata Regency	Srengseng	Kembangan	Jakarta Barat	75 m ²	665.625.000
87	PT. Kedaung Propertindo	Perumahan Citra 2 Ext Citra Garden City	Srengseng	Kembangan	Jakarta Barat	75 m ²	665.625.000
88	PT. Candrasa Pranaguna	Perumahan Mitra Gading Villa	Pegadungan	Kalideres	Jakarta Barat	417 m ²	5.473.125.000
91	PT. Pangestu Luhur	Perumahan Mitra Gading Villa	Kelapa Gading Barat	Kelapa Gading	Jakarta Utara	106 m ²	1.857.438.000
92	PT. Pangestu Luhur	Perumahan Mitra Gading Villa	Kelapa Gading Barat	Kelapa Gading	Jakarta Utara	199 m ²	3.487.077.000
93	PT. Pangestu Luhur	Perumahan Mitra Gading Villa	Kelapa Gading Barat	Kelapa Gading	Jakarta Utara	192 m ²	3.364.416.000
94	PT. Pangestu Luhur	Perumahan Mitra Gading Villa	Kelapa Gading Barat	Kelapa Gading	Jakarta Utara	353 m ²	6.185.619.000
95	PT. Pangestu Luhur	Perumahan Mitra Gading Villa	Kelapa Gading Barat	Kelapa Gading	Jakarta Utara	430 m ²	7.534.890.000
96	PT. Pangestu Luhur	Perumahan Mitra Gading Villa	Kelapa Gading Barat	Kelapa Gading	Jakarta Utara	550 m ²	9.637.650.000
97	PT. Pangestu Luhur	Perumahan Mitra Gading Villa	Kelapa Gading Barat	Kelapa Gading	Jakarta Utara	1494 m ²	26.179.362.000
98	PT. Pangestu Luhur	Perumahan Mitra Gading Villa	Kelapa Gading Barat	Kelapa Gading	Jakarta Utara	1909 m ²	33.451.407.000
99	PT. Pangestu Luhur	Perumahan Mitra Gading Villa	Kelapa Gading Barat	Kelapa Gading	Jakarta Utara	768 m ²	13.457.664.000
100	PT. Pangestu Luhur		Kelapa Gading Barat	Kelapa Gading	Jakarta Utara	452 m ²	7.920.396.000
Total						195.250 m ²	1.921.621.867.450

Berikut Berita Acara serah terima aset fasos fasum dari BPAD:

BERITA ACARA SERAH TERIMA

TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI LIMA WILAYAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
DARI PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
KEPADA KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor 306 / IV. 03. 03

Pada hari ini, Senin Tanggal 04 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Lusiana Herawati

Pt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 66 Kota Administrasi Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Bayu Meghantara, S.IP, M.Si

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang beralamat di Jalan K.S.Tubun Nomor 1 RT 02 RW 05 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam Jabatannya sebagaimana tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan dan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;

9. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Dari Pemegang Izin dan Atau Izin Pemanfaatan Ruang

10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan BAST barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

11. Instruksi Gubernur Nomor 148 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Kewajiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari Pemegang SIPPT/PPPT.

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk melakukan serah terima Tanah dan Bangunan Gedung yang terletak di Lima Wilayah Kota Administrasi Jakarta dari Pt. Kepala Badan

BERITA ACARA SERAH TERIMA

TANAH YANG TERLETAK DI LIMA WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
DARI PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
KEPADA KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor 306 / IV. 03. 03

Pada hari ini, Senin Tanggal 04 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Lusiana Herawati, SE

Pt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 66 Kota Administrasi Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Bayu Meghantara, S.IP, M.Si

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang beralamat di Jalan K.S.Tubun Nomor 1 RT 02 RW 05 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam Jabatannya sebagaimana tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan dan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;

9. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Dan Pemegang Izin dan Atau Izin Pemanfaatan Ruang

10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan BAST barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

11. Instruksi Gubernur Nomor 148 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Kewajiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari Pemegang SIPPT/PPPT.

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk melakukan serah terima Tanah yang terletak di lima Wilayah Kota Administrasi Jakarta dari Pt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut :

Gambar 10. Berita Acara Serah Terima Aset Fasos Fasum

Terdapat beberapa faktor pendorong mempengaruhi capaian penambahan persentase luasan RTH di tahun 2024 ini antara lain sebagai berikut:

a) Ketersediaan lahan fasos fasum yang diserahterimakan dari BPAD

b) Pengaplikasian Sistem Semarak Hijau dalam pendataan RTH sehingga pengelolaan data RTH menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat menghasilkan data yang akurat

Untuk faktor yang menjadi penghambat, yaitu:

a) Penambahan luasan RTH tidak dapat dilakukan melalui APBD, sehingga dilakukan optimalisasi serah terima fasos fasum

b) Fasos fasum yang diserahterimakan dari BPAD belum *clean and clear*, seperti ketidakjelasan lokasi presisi (koordinat), masih terdapat bangunan liar di atas lahan, tidak ada pengamanan aset (lahan tidak dipagar)

Atas faktor penghambat yang muncul tersebut telah dilakukan langkah tindak lanjut sebagai berikut:

a) Melakukan koordinasi dan peninjauan ulang dengan BPAD ke lokasi yang akan diserahterimakan

b) Lahan yang belum *clean and clear* dikembalikan ke BPAD dengan menambahkan catatan atas permasalahan yang ditemukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

42

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja dan faktor pendorong dan penghambat, dirumuskan rencana aksi indikator Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas tahun 2025, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Fasos Fasum melalui Verifikasi dan Validasi Kondisi Lahan Fasos Fasum
- 2) Meningkatkan Ketersediaan RTH melalui Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman, Jalur Hijau, Makam dan Kebun Bibit
- 3) Meningkatkan dan/atau Mempertahankan Kualitas dan/atau Kuantitas RTH melalui Pemeliharaan dan/atau Penataan Ruang Terbuka Hijau Taman, Jalur Hijau, Makam, Kebun Bibit dan Taman Margasatwa Ragunan

c. *Sasaran 1: Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan*

Dalam rangka pencapaian Sasaran pertama yang juga merupakan IKU Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yaitu “Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan” dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu “Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan Ruang Terbuka Hijau Hutan”. Indikator kinerja ini diukur melalui persentase luas hutan dibawah pengelolaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang telah dilakukan pembangunan/ penataan/penghijauan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas hutan. Adapun keseluruhan luas lahan hutan yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah 299,72 Ha, dengan rumus perhitungan: Luas pembangunan/penataan/ penghijauan hutan dibagi Luas hutan yang dikelola Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dikali 100%. Pada tahun 2024 dengan membandingkan antara target 2024 (77,09%) dan realisasi 2023 (76,39%) serta mempertimbangkan target 2024 (76,91%), didapatkan target penambahan pengelolaan hutan sebesar 0,52%.

Tabel 20. *Capaian Indikator Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan Ruang Terbuka Hijau Hutan*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2023		2024		Capaian
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan Ruang Terbuka Hijau Hutan	75,58%	76,39%	76,91%	77,09%	100,23 %

Terkait dengan pencapaian sasaran tersebut, pada tahun 2024, telah selesai dilakukan pembangunan dan penataan RTH Hutan Kota dengan total luasan sebanyak 2,1 ha. Pembangunan RTH hutan kota dilakukan pada 3 lokasi yaitu, RTH hutan kota Pinang II, RTH Hutan kota Ujung Menteng baru dan RTH hutan kota sawo kecil. Untuk Penataan RTH Hutan kota dilakukan pada 2 lokasi yaitu RTH Hutan kota Munjul dan RTH Hutan Kota Cipayung.

Tabel 21. *Pembangunan dan Penataan Hutan Kota 2024*

No	Lokasi	Pembangunan/Penataan	Luas (M2)
1	RTH Hutan Kota Pinang II	Pembangunan	6.016
2	RTH Hutan Kota Ujung Menteng Baru	Pembangunan	5.200

No	Lokasi	Pembangunan/Penataan	Luas (M2)
3	RTH Hutan Sawo Kecil	Pembangunan	7.700
4	RTH Hutan Kota Munjul	Penataan	1.860
5	RTH Hutan Kota Cipayung	Penataan	258
Total			21.034

Dengan penambahan luas pengelolaan hutan sebesar 2,1 ha tersebut maka didapatkan Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan Ruang Terbuka Hijau Hutan sebesar 77,09 %, setara dengan capaian sebesar 100,23 %



Gambar 11. Pembangunan RTH Taman Setu Biru (Kampung Setu RT 007 RW 004 Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur)



Gambar 12. Pembangunan RTH Taman Haji Niman (Jl. Lebak Bulus V RT.07 RW.04, Kelurahan Cilandak Carat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan)



Gambar 13. Pembangunan RTH Taman Melati (Jl. AUP Barat No.1 RT 009/06, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan)

Untuk mendukung capaian kinerja Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan, pada tahun 2024 telah dilakukan kolaborasi, kerjasama dengan stakeholder dalam kegiatan penghijauan melalui skema CSR dan atau sejenisnya, dengan total sebanyak 153 kegiatan kerjasama yang melibatkan 145 stakeholder. Rincian kegiatan penghijauan dengan skema CSR disajikan pada tabel berikut:

Tabel 22. Kegiatan Penanaman Bibit Mangrove Dengan Skema CSR Bersama Pihak Eksternal

NO	INSTANSI /PIHAK YANG MENANAM	TANGGAL & HARI PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN
1	Pecinta Boy Ban Kore	Minggu 07 Januari 2024	Ekowisata
2	SMP PRAMITA	Selasa 09 Januari 2024	Ekowisata
3	Kertabumi bersama Manulife	Rabu 24 Januari 2024	Ekowisata
4	Mangrovejkt.id ft. EF Toefl	Sabtu 27 Januari 2024	Ekowisata
5	PKBM An'ash ARA	Sabtu 03 Februari 2024	Ekowisata
6	Mangrovejkti.com bersama TK MENTARI	Sabtu 10 Februari 2024	Ekowisata
7	Mangrovejkt.id bersama Efindonesia Forum Organisasi Siswa Jakarta	Minggu 11 Februari 2024	Ekowisata
8	Volun Trip Kita Bisa	Sabtu 18 Februari 2024	Ekowisata
9	Benih baik bersama DBS	Selasa 20 Februari 2024	Ekowisata
10	Mangrovejkt.id ft. Adhi Green	Rabu 21 Februari 2024	Ekowisata
11	LEVA bersama Kalventis	Rabu 21 Februari 2024	Ekowisata
12	Bumi Journey 1	Sabtu 24 Februari 2024	Ekowisata
13	Kertabumi 1	Sabtu 24 Februari 2024	Ekowisata
14	SMP 32 Muhamadiyah	Kamis 29 Februari 2024	Ekowisata
15	SD ATTALA BOGOR	Kamis 29 Februari 2024	Ekowisata
16	Universitas Pertamina	Minggu 03 Maret 2024	Ekowisata
17	Bina Tunas Bangsa Sechool	Selasa 05 Maret 2024	Ekowisata
18	Mangrovejkt.id bersama Junior Ruby Club	Sabtu 09 Maret 2024	Elang Laut
19	Mangrovejkt.id bersama Sango Hotel Management	Sabtu 09 Maret 2024	Hutan Lindung POS II
20	Yayasan Santo Yoseph	Sabtu 16 Maret 2024	Ekowisata
21	Mangrovejkt.id TK ISMILE PRESCHOOL	Rabu 20 Maret 2024	Ekowisata
29	Mangrovejkt.id bersama Hotel Grand Mercure	Selasa 23 April 2024	Ekowisata
30	Uniqlo ft SLB Negri 5 Jakarta	Kamis 25 April 2024	Ekowisata
31	BAPEDAS Citarum Ciliwung bersama Mentri KLHK	Kamis 25 April 2024	Ekowisata
32	IMTIL (Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan) 2	Minggu 28 April 2024	Ekowisata
33	Pupik TUS	Selasa 30 April 2024	Ekowisata
34	Mangrovejkt.id bersama BRINKS	Kamis, 02 Mei 2024	Ekowisata
35	Lindungi Hutan bersama Yayasan Bunda Mulia	Sabtu, 04 Mei 2024	Ekowisata
36	Mangrovejkt.id bersama AAJI	Sabtu, 04 Mei 2024	Ekowisata
37	Lions Clubs International 1	Minggu, 05 Mei 2024	Ekowisata
38	Benih Baik	Senin, 06 Mei 2024	Ekowisata
39	Sekolah Alam Bekasi ft mangrove jkt	Kamis, 16 Mei 2024	Ekowisata
40	Komunitas Turun Tangan	Minggu, 19 Mei 2024	Ekowisata
41	Pramuka Saka Wanabakti	Minggu, 19 Mei 2024	Ekowisata
42	IKAMAT	Selasa, 21 Mei 2024	Ekowisata
43	PT. Imora Motor bekerja sama dengan	Rabu, 22 Mei 2024	Ekowisata

NO	INSTANSI /PIHAK YANG MENANAM	TANGGAL & HARI PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN
	IKAMAT		
44	SMP MPK KAJ	Rabu, 22 Mei 2024	Ekowisata
45	SMA Lab School Jakarta	Sabtu, 26 Mei 2024	Ekowisata
46	Fakultas Kehutanan IPB University	Senin, 27 Mei 2024	Ekowisata
47	Kertabumi ft Remaja	Senin, 27 Mei 2024	Ekowisata
48	Lab School Jakarta	Jum'at, 31 Mei 2024	Ekowisata
49	Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI)	Sabtu, 01 Juni 2024	Ekowisata
50	Badan Pertanahan Nasional	Rabu, 05 Juni 2024	Ekowisata
51	BPJS Ketenagakerjaan	Rabu, 05 Juni 2024	Ekowisata
52	Bumi Journey ft Accenture	Sabtu, 08 Juni 2024	Ekowisata
53	Lindungi Hutan bersama PT Wings	Sabtu, 08 Juni 2024	Ekowisata
54	Sekolah Santa Ursula	Selasa, 11 Juni 2024	Ekowisata
55	IKAMAT bersama Sekolah Pangudi Luhur	Rabu, 12 Juni 2024	Ekowisata
56	Lindungi Hutan bersama Pertamina Hulu Indonesia	Sabtu, 15 Juni 2024	Ekowisata
57	PT Bakau Untuk Negeri/ Benihbaik.com	Rabu, 19 Juni 2024	Galatama
58	PT Hillcon Tbk	Kamis, 20 Juni 2024	Ekowisata
59	PT Bakau Untuk Negeri/ Benihbaik.com	Jum'at, 21 Juni 2024	Galatama
60	Mangrovejkt.id bersama BUMA	Selasa, 25 Juni 2024	Ekowisata
61	Dompot Dhuafa bersama Pizza Marzano	Rabu, 26 Juni 2024	Ekowisata
62	Lindungi Hutan bersama PT Pigeon Indonesia	Sabtu, 29 Juni 2024	Ekowisata dan Galatama
63	Lindungi Hutan bersama The Westin x Siji Art	Minggu, 30 Juni 2024	Ekowisata dan Galatama
64	Lindungi Hutan bersama Bussan Auto Finance (BAF)	Sabtu, 06 Juli 2024	Galatama
65	Hotel 101 Urban Kelapa Gading	Minggu, 07 Juli 2024	Ekowisata
66	Mangrovejkt.id bersama Coca Cola	Rabu, 10 Juli 2024	Ekowisata
67	Mangrovejkt.id bersama Juli Widyawan & Partner	Sabtu, 13 Juli 2024	Ekowisata
68	Mangrovejkt.id bersama KITZ Corporation of ASIA Pacific PTE.Ltd	Kamis, 18 Juli 2024	Ekowisata
69	IKAMAT bersama PT Segar Kumala Indonesia TBK	Jum'at, 19 Juli 2024	Ekowisata
70	KTH Flora Mangrove	Sabtu, 20 Juli 2024	Hutan Lindung Pos 2
71	Wacker Chemicals	Jum'at, 26 Juli 2024	Hutan Lindung Pos 2
72	Divers Clean Action (DCA) bersama United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia	Jum'at, 26 Juli 2024	Ekowisata
73	PT Asianagro Agung Jaya (APICAL)	Jum'at, 26 Juli 2024	Elang Laut
74	Mangrovejkt.id bersama Pilar Nusantara	Jum'at, 26 Juli 2024	Ekowisata
75	PT Panin Dai-ichi Life	Sabtu, 27 Juli 2024	Ekowisata
76	Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti	Minggu, 28 Juli 2024	Galatama
77	Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti	Minggu, 28 Juli 2024	Hutan Lindung Pos 2
78	IKAMaT bersama PT Faretina	Senin, 29 Juli 2024	Ekowisata
79	LEVA bersama Shimizu Bangun Cipta Kontraktor	Sabtu, 03 Agustus 2024	Hutan Lindung Pos 2
80	Mangrovejkt.id bersama PT PP URBAN	Kamis, 08 Agustus 2024	Ekowisata dan Hutan Lindung Pos 2

NO	INSTANSI /PIHAK YANG MENANAM	TANGGAL & HARI PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN
81	Kertabumi bersama Mahaiswa Universitas Prasetya Mulya	Sabtu, 10 Agustus 2024	Ekowisata
82	Mangrovejkt.id bersama PT Unza Vitalis	Sabtu, 10 Agustus 2024	Ekowisata
83	KLHK - BPDAS Citarum Ciliwung (Festival LIKE 2)	Sabtu, 10 Agustus 2024	Hutan Lindung Pos 2
84	Mangrovejkt.id bersama DSM Fimerch	Kamis, 15 Agustus 2024	Ekowisata
85	Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia	Sabtu, 17 Agustus 2024	Ekowisata
86	Mangrovejkt.id bersama Birthday Event	Sabtu, 17 Agustus 2024	Ekowisata
87	Mangrovejkt.id bersama FWD Insurance	Rabu, 21 Agustus 2024	Ekowisata
88	Komunitas Novo Club	Sabtu, 24 Agustus 2024	Hutan Lindung Pos 2
89	Rimbawan Jakarta	Rabu, 28 Agustus 2024	Hutan Lindung Pos 2
90	Global Leader Bridge Project (Korean Student)	Jum'at, 30 Agustus 2024	Ekowisata
91	Bumi Journey ft Accenture	Sabtu, 31 Agustus 2024	Ekowisata
92	Kemangteer Jakarta 1	Minggu, 01 September 2024	Hutan Lindung Pos 2
93	SMP Bintang Kejora	Rabu, 04 September 2024	Ekowisata
94	PT Pacific Rubber Works	Selasa, 03 September 2024	Hutan Lindung Pos 2
95	Gereja HKBP Resort Kebon Jeruk Jakarta Barat	Sabtu, 07 September 2024	Ekowisata
96	Kertabumi 2	Sabtu, 07 September 2024	Ekowisata
97	Filantra	Kamis, 12 September 2024	Hutan Lindung Pos 2
98	Mangrovejkt.id bersama HH Global	Jum'at, 13 September 2024	Ekowisata
99	PT Radio Sonora	Sabtu, 14 September 2024	Hutan LindungPos 2
100	SMP Katolik Sang Timur	Sabtu, 21 September 2024	Ekowisata
101	PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	Sabtu, 21 September 2024	Hutan Lindung Pos 2
102	Mangrovejkt.id bersama Global Logistic	Sabtu, 21 September 2024	Ekowisata
103	Mangrovejkt.id bersama Koexindo	Rabu, 25 September2024	Hutan LindungPos 2
104	Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) DKI Jakarta	Jum'at, 27 September 2024	Hutan Lindung Pos 2
105	Lindungi Hutan bersama K - Line	Jum'at, 27 September 2024	Galatama
106	Mangrovejkt.id bersama GREAT EASTERN	Sabtu, 28 September 2024	Hutan Lindung Pos 2
107	Mangrovejkt.id bersama FRACHT	Sabtu, 28 September 2024	Hutan Lindung Pos 2
108	AEON	Sabtu, 28September 2024	Elang Laut
109	STIKES HUSADA	Minggu, 29 September 2024	Hutan Lindung Pos 2
110	Mangrovejkt.id bersama REPSOL	Senin, 30 September 2024	Hutan Lindung Pos 2
111	Jakarta Japan Club	Selasa, 01 Oktober 2024	Hutan Lindung Pos 2
112	Mangrovejkt.id bersama PT AFI	Jum'at, 11 Oktober 2024	Hutan Lindung Pos 2
113	Mangrovejkt.id bersama IZUZU	Jum'at, 11 Oktober 2024	Hutan Lindung Pos 2
114	Mangrovejkt.id bersama PT CLARISA	Minggu, 13 Oktober 2024	Hutan Lindung Pos 2
115	Kemangteer Jakarta 2	Minggu, 13 Oktober 2024	Hutan Lindung Pos 2
116	Mahasiswa BINUS University	Selasa, 15 Oktober 2024	Hutan Lindung Pos 2
117	Bakrie University	Sabtu, 19 Oktober 2024	Hutan Lindung Pos 2
118	Mangrovejkt.id bersama Binus University 1	Minggu, 20 Oktober 2024	Ekowisata
119	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	Rabu, 23 Oktober 2024	Hutan Lindung Pos 2
120	SECOM Group	Jum'at, 25 Oktober 2024	Hutan Lindung Pos 2
121	Vilantra bersama MNC Bank	Senin, 28 Oktober 2024	Hutan Lindung Pos 2
122	Lindungi Hutan bersama PT Idemitsu	Sabtu, 02 November 2024	Galatama

NO	INSTANSI /PIHAK YANG MENANAM	TANGGAL & HARI PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN
123	Mangrovejkt.id bersama Australia International School (AIS)	Selasa, 05 November 2024	Ekowisata
124	Lindungi Hutan bersama KUFPEC Indonesia	Kamis, 07 November 2024	Galatama
125	Lions Clubs International 2	Sabtu, 09 November 2024	Hutan Lindung Pos 2
126	Mangrovejkt.id bersama Samsung Indonesia	Sabtu, 09 November 2024	Hutan Lindung Pos 2
127	Tim Hijau Pesisir & tim Greenvengers ID JYCLC	Sabtu, 09 November 2024	Hutan Lindung Pos 2
128	Paguyuban Perantau Purbalingga (Papeling)	Minggu, 10 November 2024	Hutan Lindung Pos 2
129	Mangrovejkt.id bersama Kunori High School	Selasa, 12 November 2024	Ekowisata
130	Mangrovejkt.id bersama Binus University 2	Selasa, 12 November 2024	Ekowisata
131	Sebumi bersama Kilang Pertamina International	Selasa, 12 November 2024	Ekowisata
132	Mangrovejkt.id bersama JIS	Sabtu, 16 November 2024	Ekowisata
133	Binus University	Sabtu, 16 November 2024	Hutan Lindung Pos 2
134	Lindungi Hutan bersama Panin Aset	Rabu, 20 November 2024	Galatama
135	PT Carsurin Tbk	Kamis, 21 November 2024	Ekowisata
136	Lindungi Hutan bersama Vivere	Jum'at, 22 November 2024	Galatama
137	Mangrovejkt.id bersama Pertamina	Jum'at, 22 November 2024	Ekowisata
138	Filantra bersama DKSH	Jum'at, 22 November 2024	Hutan Lindung Pos 2
139	Mangrovejkt.id bersama Wastehub	Sabtu, 23 November 2024	Ekowisata
140	Mangrovejkt.id bersama PT Berdikari	Sabtu, 23 November 2024	Ekowisata
141	FKM UI	Sabtu, 23 November 2024	Ekowisata
142	BEM UI	Sabtu, 23 November 2024	Hutan Lindung Pos 2
143	Mangrovejkt.id - UIN	Minggu, 24 November 2024	Hutan Lindung Pos 2
144	SLB B Pangudi Luhur Jakarta	Senin, 25 November 2024	Ekowisata
145	Kertabumi 3	Kamis, 28 November 2024	Ekowisata
146	PT Tripura Indah Persada	Kamis, 28 November 2024	Hutan Lindung Pos 2
147	MDI - BANK DKI	Kamis, 28 November 2024	Hutan Lindung Pos 2
148	SMAN 70 Bulungan	Jum'at, 29 November 2024	Hutan Lindung Pos 2
149	Mangrovejkt.id	Jum'at, 29 November 2024	Hutan Lindung Pos 2
150	Kertabumi 4	Jum'at, 06 Desember 2024	Hutan Lindung Pos 2
151	Mitsubishi Electrict	Sabtu, 07 Desember 2024	Hutan Lindung Pos 2
152	Kertabumi	Sabtu, 07 Desember 2024	Hutan Lindung Pos 2
153	Bumi Journey 2	Kamis, 12 Desember 2024	Ekowisata

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan capaian kinerja 2024, dirumuskan rencana aksi pada indikator Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan tahun 2025, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dan/atau Mempertahankan Kualitas dan/atau Kuantitas Tutupan Lahan melalui Pemeliharaan dan Pengamanan Kawasan Hutan Negara
- 2) Meningkatkan Tutupan Lahan melalui Penanaman Pohon dan Penanaman Mangrove
- 3) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat melalui Kolaborasi Penghijauan Lingkungan melalui skema CSR dan atau sejenisnya

d. *Sasaran 2: Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau*

Dalam rangka pencapaian Sasaran pertama yang juga merupakan IKU Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yaitu “Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau” dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu “Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi”. Infrastruktur hijau-biru terintegrasi adalah penyediaan sumur resapan/bioswale/kolam retensi/rain garden/embung pada lahan ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Indikator kinerja ini diukur melalui perhitungan dengan rumus: jumlah kelurahan yang memiliki infrastruktur hijau-biru dibagi jumlah total kelurahan di 5 wilayah DKI Jakarta (262 kelurahan) dikali 100%. Pada tabel berikut, disajikan realisasi indikator persentase wilayah kelurahan dengan infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi.

Tabel 23Capaian Indikator Persentase Wilayah kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi	30%	30,34%	101,13%

Pada tahun 2024, terdapat penambahan sebanyak 8 Kelurahan (total 81 Kelurahan) yang telah mengimplementasikan infrastruktur hijau-biru terintegrasi dengan realisasi sebesar 30,34 %, melampaui dari target yang ditetapkan (30%). Adapun lokasi penambahan 8 kelurahan tersebut disajikan pada tabel dibawah:

Tabel 24. Pembangunan/Penataan Infrastruktur Hijau Biru Terintegrasi 2024

NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Jakarta Pusat	Tanah Abang	Kelurahan Kebon Melati
2	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	Kelurahan Cilandak Timur
3	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	Kelurahan Pasar Minggu
4	Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	Kelurahan Pela Mampang
5	Jakarta Selatan	Cilandak	Kelurahan Pondok Labu
6	Jakarta Selatan	Jagakarsa	Kelurahan Ragunan
7	Jakarta Utara	Tanjung Priok	Kelurahan Sungai Bambu
8	Jakarta Utara	Tanjung Priok	Kelurahan Sunter Agung

Adapun untuk daftar kelurahan yang telah mengimplementasikan infrastruktur hijau-biru sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 25. Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi Sampai dengan tahun 2024

No	Wilayah	Kelurahan
1	Jakarta Barat	Kelurahan Angke
2	Jakarta Barat	Kelurahan Duri Kepa
3	Jakarta Barat	Kelurahan Duri Kosambi
4	Jakarta Barat	Kelurahan Jelambar Baru
5	Jakarta Barat	Kelurahan Joglo
6	Jakarta Barat	Kelurahan Kalideres
7	Jakarta Barat	Kelurahan Kamal
8	Jakarta Barat	Kelurahan Kapuk
9	Jakarta Barat	Kelurahan Kedoya Selatan
10	Jakarta Barat	Kelurahan Kemanggisan
11	Jakarta Barat	Kelurahan Kembangan Selatan
12	Jakarta Barat	Kelurahan Kembangan Utara
13	Jakarta Barat	Kelurahan Mangga Besar
14	Jakarta Barat	Kelurahan Meruya Utara
15	Jakarta Barat	Kelurahan Pegadungan
16	Jakarta Barat	Kelurahan Rawa Buaya
17	Jakarta Barat	Kelurahan Srengseng
18	Jakarta Barat	Kelurahan Tanjung Duren Selatan
19	Jakarta Barat	Kelurahan Tomang
20	Jakarta Barat	Kelurahan Wijaya Kusuma
21	Jakarta Pusat	Kelurahan Bungur
22	Jakarta Pusat	Kelurahan Cempaka Putih Timur
23	Jakarta Pusat	Kelurahan Gambir
24	Jakarta Pusat	Kelurahan Gelora
25	Jakarta Pusat	Kelurahan Gunung Sahari Utara
26	Jakarta Pusat	Kelurahan Kebon Kacang
27	Jakarta Pusat	Kelurahan Kebon Melati
28	Jakarta Pusat	Kelurahan Pegangsaan
29	Jakarta Selatan	Kelurahan Ciganjur
30	Jakarta Selatan	Kelurahan Cilandak Timur
31	Jakarta Selatan	Kelurahan Cipadak
32	Jakarta Selatan	Kelurahan Duren Tiga
33	Jakarta Selatan	Kelurahan Grogol Selatan
34	Jakarta Selatan	Kelurahan Jagakarsa
35	Jakarta Selatan	Kelurahan Jatipadang
36	Jakarta Selatan	Kelurahan Keb. Lama Utara
37	Jakarta Selatan	Kelurahan Kramat Pela
38	Jakarta Selatan	Kelurahan Lenteng Agung
39	Jakarta Selatan	Kelurahan Pasar Minggu
40	Jakarta Selatan	Kelurahan Pejaten Barat

No	Wilayah	Kelurahan
41	Jakarta Selatan	Kelurahan Pela Mampang
42	Jakarta Selatan	Kelurahan Petukangan Utara
43	Jakarta Selatan	Kelurahan Pondok Labu
44	Jakarta Selatan	Kelurahan Pulo
45	Jakarta Selatan	Kelurahan Ragunan
46	Jakarta Selatan	Kelurahan Rawajati
47	Jakarta Selatan	Kelurahan Selong
48	Jakarta Selatan	Kelurahan Senayan
49	Jakarta Selatan	Kelurahan Srengseng Sawah
50	Jakarta Selatan	Kelurahan Tanjung Barat
51	Jakarta Selatan	Kelurahan Tebet Timur
52	Jakarta Selatan	Kelurahan Kebagusan
53	Jakarta Timur	Kelurahan Bambu Apus
54	Jakarta Timur	Kelurahan Cakung Barat
55	Jakarta Timur	Kelurahan Ceger
56	Jakarta Timur	Kelurahan Cibubur
57	Jakarta Timur	Kelurahan Cilangkap
58	Jakarta Timur	Kelurahan Cililitan
59	Jakarta Timur	Kelurahan Cipayung
60	Jakarta Timur	Kelurahan Cipinang Melayu
61	Jakarta Timur	Kelurahan Ciracas
62	Jakarta Timur	Kelurahan Duku
63	Jakarta Timur	Kelurahan Jati
64	Jakarta Timur	Kelurahan Kelapa Dua Wetan
65	Jakarta Timur	Kelurahan Lubang Buaya
66	Jakarta Timur	Kelurahan Makasar
67	Jakarta Timur	Kelurahan Malaka Sari
68	Jakarta Timur	Kelurahan Munjul
69	Jakarta Timur	Kelurahan Penggilingan
70	Jakarta Timur	Kelurahan Pinang Ranti
71	Jakarta Timur	Kelurahan Pisangan Baru
72	Jakarta Timur	Kelurahan Pondok Ranggon
73	Jakarta Timur	Kelurahan Rawamangun
74	Jakarta Timur	Kelurahan Setu
75	Jakarta Timur	Kelurahan Ujung Menteng
76	Jakarta Utara	Kelurahan Kelapa Gading Barat
77	Jakarta Utara	Kelurahan Marunda
78	Jakarta Utara	Kelurahan Pejagalan
79	Jakarta Utara	Kelurahan Rorotan
80	Jakarta Utara	Kelurahan Sungai Bambu
81	Jakarta Utara	Kelurahan Sunter Agung

3.2.2 CAPAIAN SASARAN KHUSUS

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2024, terdapat 8 sasaran kinerja pada kelompok Sasaran Khusus, sebagaimana disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 26. Capaian Kinerja Sasaran Khusus

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan
1	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100	100	Persen
2	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100	100	Persen
3	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	96,05	Persen
4	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	100	Persen
5	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja atas Implementasi aspek	71	90,87	Persen
6	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100	100	Persen
7	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	100	Nilai
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	100	100	Persen

Berdasarkan tabel diatas, dari 8 indikator kinerja sasaran khusus, keseluruhan indikator tersebut tercapai/melampaui dari target yang ditetapkan. Untuk penjelasan capaian kinerja masing-masing indikator, diuraikan sebagai berikut

- a. *Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah*

Sasaran khusus dengan indikator implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dilakukan pada Program/kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Capaian kinerja indikator

sasaran khusus ini sebesar 100 %, dengan penjelasan parameter pengukuran sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan kampanye dan sosialisasi program/Kegiatan Pengelolaan RTH dalam bentuk infografis, video dan foto kolase yang disebarluaskan melalui media sosial yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan kota
- Materi-materi kampanye dan sosialisasi tersebut telah menjelaskan mengenai profil, fasilitas serta jejaring hijau biru yang terdapat RTH yang dikelola Dinas Pertamanan dan Hutan kota, edukasi pengenalan tanaman yang efektif dalam menyerap polutan maupun pengendali banjir, penyediaan taman atap dan lahan hijau pada area privat, pengenalan upaya menambah estetika kota melalui penghijauan, dekorasi ataupun penataan RTH, serta pelaksanaan penanaman yang dilakukan secara masif dalam rangka antisipasi banjir di wilayah DKI Jakarta
- Selama periode Tahun 2024 (triwulan I-IV), sesuai dengan hasil koordinasi tidak terdapat kondisi krisis komunikasi
- Selama periode Tahun 2024 (triwulan I-IV), terhadap pertanyaan dan komentar warganet pada media sosial, telah diberikan respon sesuai dengan panduan.

b. Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas

Pada indikator kinerja Nilai Tata Kelola SDI, didapatkan capaian kinerja sebesar 100 %, dengan penjelasan parameter pengukuran sebagai berikut:

- Sesuai dengan Definisi operasional, Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:
 - a) Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.
 - b) Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.
 - c) Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.
 - d) Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data
- Pada periode 2024, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota telah menyampaikan data sebanyak 31 jenis data melalui sistem Satudata, dan telah dilakukan penilaian dengan parameter 4 aspek tersebut oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku Walidata Provinsi.

Faktor yang mendorong terlaksananya sasaran kinerja ini yaitu dilakukannya pengumpulan dan pembaruan data secara berkala, sementara untuk faktor penghambat yang muncul, yaitu terdapat beberapa komponen data yang diminta tidak sesuai dengan ketersediaan komponen data di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

c. Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel

Pada sasaran kinerja terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel dengan indikator Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, didapatkan capaian kinerja sebesar 100%

sesuai dengan target yang ditetapkan. Pengukuran indikator kinerja melalui Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Adapun untuk penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi:

- Bobot 5%
PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD
- Bobot 85%
PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki
- Bobot 10%
PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)

Terdapat faktor penghambat yang muncul dalam pelaksanaan sasaran kinerja ini, yaitu; Sulit melakukan identifikasi BMD yang perolehan tahun lama, serta BMD yang sudah pindah tangan (misal penggunaan KDO kepada ASN yang sudah pensiun yang tidak terlapor/pengembalian BMD).

d. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri

Pada indikator persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri, dari target kinerja sebesar 80 %, terealisasi capaian sebesar 96,05%. Adapun penjelasan parameter pengukuran adalah sebagai berikut:

- 4) Definisi operasional dari indikator ini yaitu jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah). Untuk formulasi pengukuran didapatkan rumus sebagai berikut:

Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	=	$\frac{\text{Jumlah realisasi belanja pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri}}{\text{Realisasi pembayaran (SPJ) belanja pengadaan}} \times 100\%$
---	---	---

Untuk sumber data:

- Total Pelaksanaan PDN Penyedia berasal dari Bigbox LKPP
 - Pencatatan Swakelola berasal dari BPPBJ
 - Realisasi Pembayaran berasal dari BPKD
- 5) Untuk Tahun 2024, total belanja PDN sebesar Rp 1.001.168.281.180,- sementara realisasi pembayaran belanja pengadaan sebesar Rp.1.042.377.447.814,- sehingga didapatkan prosentase realisasi belanja belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan

koperasi dari hasil produksi dalam negeri, sebesar 96,05 %

- 6) Faktor penghambat dalam capaian kinerja ini adalah beberapa item barang pengadaan hanya tersedia melalui impor, contohnya adalah pompa. Sementara faktor pendorongnya yaitu, adanya monitoring secara intensif dan berkala dari pimpinan

e. Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun

Pada indikator Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun, telah terealisasi 100 %. Capaian kinerja ini dicapai melalui keikutsertaan pengembangan kompetensi melalui pendidikan/pelatihan oleh BPSDM serta melalui podcast bangkom SKPD seperti podcast rabu belajar, podcast kopi sedap dan Sijule.

f. Meningkatnya Manajemen Pengetahuan

Pada indikator Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan, telah tercapai target kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja ini didapatkan melalui penghimpunan aset pengetahuan dalam bentuk artikel tulisan dan atau video dengan target sebanyak 4 laporan dalam bentuk artikel/video yang disampaikan kepada BPSDM pada Triwulan III dan IV. Berikut daftar laporan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota:

- Video: Digitalisasi kesehatan pohon terintegrasi (di-kepo-in)
- Video: Pengolahan pupuk kompos
- Video: Uji laboratorium kesuburan tanah
- Video: Proses perbanyak tanaman

g. Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

Pada indikator Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko, telah tercapai target kinerja sebesar 100% dengan ukuran keberhasilan output berupa Laporan Pemantauan Risiko Triwulan II dan Triwulan IV, yang diverifikasi oleh Inspektorat dan ditunangkan ke dalam Berita Acara. Laporan pemantauan risiko merupakan bentuk pemantauan secara berkala (triwulan) terhadap rencana tindak/penanganan atas identifikasi profil risiko dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Identifikasi profil risiko, rencana tindak serta laporan pemantauan risiko dilakukan melalui Sistem Informasi SiPerisai-Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

h. Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Pada indikator Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi, telah tercapai kinerja sebesar 90,87 dari target kinerja sebesar 71. Capaian kinerja ini didapatkan dari perhitungan atas aspek implementasi, berupa:

- Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Adapun untuk validasi capaian kinerja indikator ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2.3 CAPAIAN SASARAN OPERASIONAL

Sasaran operasional terdiri atas 4 indikator, yaitu: terselesaikannya tindak lanjut Arahan gubernur, meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat, meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat dan terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK). Berdasarkan pada tabel dibawah, dari 4 sasaran kinerja operasional, 2 sasaran kinerja tercapai sesuai target yaitu sasaran terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur dan sasaran meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat.

Tabel 27. Capaian kinerja Sasaran Operasional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan
1	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	100	Persen
2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	89	Persen
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	88,6	91,1	indeks
4	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	49,76	Persen

Adapaun uraian capaian masing-masing indikator, diuraikan sebagai berikut:

a. *Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur*

Pada indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur, karena untuk periode tahun 2024 tidak ada arahan Gubernur kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, maka capaian kinerja memenuhi target yang ditetapkan.

b. Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat

Pada sasaran kinerja meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat dengan indikator persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat, didapatkan capaian kinerja sebesar 88,85 %, dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Pengaduan masyarakat dan penyelesaian aduan oleh UKPD terdokumentasikan melalui sistem CRM. Kendala yang dihadapi untuk penyelesaian aduan masyarakat, meliputi:

- banyak laporan yang diluar wewenang Pemprov DKI (yang dilaporkan bukan area public)
- tindak lanjut laporan memerlukan anggaran terlebih dahulu, terkait perbaikan atau penambahan sarana prasarana
- tindak lanjut laporan memerlukan partisipasi SKPD lain

c. *Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat*

Pada sasaran kinerja meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat dengan indikator hasil survei pelayanan masyarakat melalui sistem Jaksurvei, didapatkan capaian kinerja berupa hasil survei dengan indeks 91,12. Capaian kinerja ini sudah

melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 88,6. Ketercapaian sasaran kinerja ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan layanan dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang diberikan kepada masyarakat.

d. *Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)*

Pada sasaran kinerja terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) dengan indikator persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK), didapatkan capaian kinerja sebesar 49,76% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Ketercapaian indikator ini melalui beberapa tindak lanjut yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota terhadap rekomendasi temuan dari BPK, diantaranya;

- Membuat SK Penetapan daftar hitam pennyedia barang/jasa yang tidak profesional dan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak
- Melakukan langkah-langkah pengamanan dan merencanakan pembangunan
- Kepala Dinas telah menginstruksikan kepada Kepala UP Tanah untuk melakukan pengamanan aset tanah dengan menagih kewajiban dari penjual lahan
- Melunasi sisa TGR (Tuntutan Ganti Rugi) dengan angsuran

Dalam upaya menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut terdapat kendala yang dihadapi, yaitu;

- Adanya pergantian pejabat
- Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan koordinasi dengan penyedia Barang/jasa

3.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Berdasarkan alokasi anggaran, pagu awal DPA Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2024 adalah Rp. 1.302.726.081.943 ,- Namun pada bulan November berdasarkan DPA Perubahan tahun 2024, pagunya berubah menjadi Rp. 1.295.564.752.481,-. Untuk pagu dan realisasi dari setiap program, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28. Realisasi Anggaran 2024

Kode	Program	2024		
		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)
3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	142.021.356	134.006.170	94,36
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	588.914.786	542.307.876	92,09
3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	348.131.101	331.172.625	95,13
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	30.081.330.204	28.941.441.513	96,21
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	888.561.800.366	859.271.422.088	96,70
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	375.842.554.668	343.451.258.950	91,38
Total		1.295.564.752.481	1.232.671.609.222	95,15

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2024, capaian serapan anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mencapai 95,15 %. Untuk serapan anggaran, secara umum mencapai serapan lebih dari 90 %. Adapun sisa anggaran yang tidak terserap merupakan bagian dari efisiensi anggaran tahun 2024, serta sisa pembayaran dari SPJ.

Jika dijabarkan penyerapan anggaran di tingkat SKPD/UKPD Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, maka Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki penyerapan anggaran tertinggi sebesar 97,72%, sementara Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki penyerapan anggaran terendah yakni sebesar 92,65%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel rekapitulasi penyerapan anggaran tingkat SKPD/UKPD di bawah ini:

Tabel 29. Realisasi Anggaran Tahun 2024 Per UKPD

NO	SPKPD/UKPD	ANGGARAN DPA	Realisasi	
		PERUBAHAN		
		(Rp)	Rp	%
1	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	541.538.001.422	501.726.477.110	92,65%
2	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakbar	101.137.966.819	97.619.169.736	96,52%
3	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakpus	90.099.073.060	87.534.178.493	97,15%
4	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jaksel	148.159.332.135	144.781.074.777	97,72%
5	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jaktim	148.537.402.995	143.770.765.515	96,79%
6	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakut	114.369.561.381	111.269.848.069	97,29%
7	Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	27.177.598.403	26.258.524.618	96,62%
8	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	124.545.816.266	119.711.570.904	96,12%
Total		1.295.564.752.481	1.232.671.609.222	95,15%

Tabel di bawah berikut menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran level kegiatan dan program di tahun 2024. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi menyumbang proporsi tingkat efisiensi penggunaan anggaran terbesar (8,62%). Sementara itu, Program Keanekaragaman Hayati memiliki proporsi tingkat efisiensi paling kecil yaitu sebesar 3,30%.

Tabel 30. Efisiensi Penggunaan Anggaran 2024

Program	Pagu Anggaran	Realisasi		Efisiensi	
	(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	142.021.356	134.006.170	94,36	8.015.186	5,64
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan	588.914.786	542.307.876	92,09	46.606.910	7,91

Masyarakat Di Bidang Kehutanan						
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	348.131.101	331.172.625	95,13	16.958.476	4,87	
Program Pengelolaan Hutan	30.081.330.204	28.941.441.513	96,21	1.139.888.691	3,79	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	888.561.800.366	859.271.422.088	96,70	29.290.378.278	3,30	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	375.842.554.668	343.451.258.950	91,38	32.391.295.718	8,62	
Total	1.295.564.752.481	1.232.671.609.222	95,15	62.893.143.259	4,85	

3.4. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA

Sebagai *highlight* capaian kinerja strategis, bahwa untuk sasaran strategis kinerja, dari 16 indikator yang diampu oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2024, indikator yang tercapai sesuai target sebanyak 14 indikator, sementara yang tidak tercapai sebanyak 2 indikator. Jika dirinci lagi, untuk sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama, tercapai keseluruhan sebanyak 4 indikator. Untuk sasaran khusus tercapai keseluruhan sebanyak 8 indikator, untuk sasaran operasional dari 4 indikator, tercapai 2 indikator, sementara 2 indikator lainnya tidak tercapai.

 Undak faktor pendorong yang dapat mempercepat capaian target kinerja, yaitu:

- a) Bidang/Sudin/UPT melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan fisik di lapangan
- b) Monitoring dan evaluasi secara berkala dan terukur yang dilakukan oleh Kepala Dinas kepada seluruh jajaran
- c) Memberikan penugasan kepada PPTK dan Staf Teknis bersama dengan Pengawas lapangan untuk secara intensif memantau progres pembangunan fisik dan membuat proyeksi dan target harian serta dilaporkan setiap hari kepada PPK
- d) Kegiatan rutin seperti pembayaran gaji PJLP, gaji ASN, pembayaran BBM peralatan kerja, BBM KDO, dan lainnya dilaksanakan sesuai target dan diserap sesuai kebutuhan.
- e) Perencanaan X-1 pembangunan/penataan konstruksi sebagai percepatan pelaksanaan kegiatan

Adapun faktor yang menghambat pencapaian target kinerja, yaitu:

- a) Peralihan metode pengadaan pada konstruksi pembangunan taman menggunakan e-katalog, sehingga membutuhkan proses penyesuaian dengan mekanisme baru
- b) Pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan yang terkendala pada komitmen dan kesiapan dari pihak penyedia

3.5. INOVASI DAN PENGHARGAAN

Dinas Pertaman dan Hutan Kota sebagai SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki peran strategis dalam menjaga keindahan dan kenyamanan kota melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas selalu berkomitmen untuk menghasilkan inovasi dalam rangka mengakselerasi tercapainya kinerja organisasi. Untuk tahun 2024, terdapat 4 inovasi dan penghargaan yang dilaksanakan dan diterima Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, yaitu:

- a) Penghargaan dari Musium Rekor Dunia Indonesia atas Penanaman Vegetasi Terbanyak untuk Penghijauan Perkotaan dalam Waktu Satu Tahun
Penghargaan ini diterima Dinas Pertamanan dan Hutan Kota karena dalam satu tahun (2023) telah melakukan penanaman vegetasi terbanyak untuk penghijauan perkotaan dalam perkotaan. Sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023 tercatat telah dilakukan penanaman pohon berjumlah 6.560.396 tanaman, yang terdiri dari 246.651 pohon pelindung dan pohon produktif serta 6.158.518 tanaman hias dan 155.227 pohon mangrove. Penanaman tersebut dilakukan oleh banyak pihak seperti unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta penggiat lingkungan.
- b) Penghargaan dari GRAB atas Kolaborasi Strategis dalam Menciptakan Dampak Positif di Jakarta (*Strategic Collaboration in Creating Positif Impact in Jakarta*)
- c) Pembangunan Sistem Informasi Semarak Hijau

Pada kondisi eksisting, pengelolaan data RTH publik milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dari mulai penginputan sampai dengan penyajian data, dilakukan melalui Sistem Informasi Jakarta Satu. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan data RTH melalui sistem tersebut, yaitu:

- 1) Munculnya double layer pada sistem, sehingga data spasial menjadi tidak valid karena sistem tidak bisa memberikan notifikasi atau menolak secara otomatis apabila terdapat double layer
- 2) Tidak adanya fitur penginputan aset non BMD yang berupa RTH, karena yang diinput ke dalam sistem hanya yang berupa aset BMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Ketiadaan proses ‘verifikasi’ yang harus dipenuhi melalui sistem oleh produsen data (Distamhut), mengakibatkan beberapa data spasial menjadi tidak valid

Dengan mempertimbangkan kendala-kendala tersebut, diperlukan satu sistem antara sebagai pengelolaan data yang terpisah namun terintegrasi dan tersinkronisasi dengan Sistem Informasi Jakarta Satu. Secara proses bisnis, adanya sistem antara ini menjalankan proses penginputan dan verifikasi data, sementara penyajian data RTH tetap dilakukan melalui Sistem Informasi Jakarta Satu. Pemisahan proses bisnis pengelolaan data melalui dua sistem informasi ini akan lebih memberikan peran bagi Distamhut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau sebagai produsen data untuk menghasilkan data yang lebih valid serta memungkinkan penginputan data RTH lebih luas baik yang berasal dari aset BMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun aset non BMD yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan pengelolaan RTH publik.



Gambar 14. Proses Pembangunan Sistem Informasi Semarak Hijau

d) Inovasi Pelayanan Pencegahan Bencana Pohon Tumbang Sedin Mungkin melalui Digitalisasi Kesehatan Pohon Terintegrasi (DI-KEPO-IN)

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memperoleh penghargaan dari Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai juara 3 kategori Perangkat Daerah dalam acara Jakarta Innovation Awards 2024. Penghargaan ini diperoleh melalui inovasi yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota melalui “Peningkatan Pelayanan Pencegahan Bencana Pohon Tumbang Sedin Mungkin Melalui Digitalisasi Kesehatan Pohon Terintegrasi (DI-KEPO-IN)”.

Adanya inovasi Pelayanan Pencegahan Bencana Pohon Tumbang Sedin Mungkin melalui Digitalisasi Kesehatan Pohon Terintegrasi (DI-KEPO-IN) bertujuan sebagai antisipasi melalui tindakan pencegahan pohon tumbang dan percepatan eksekusi untuk pohon-pohon yang dinyatakan tidak sehat. Pemeriksaan kesehatan batang pohon menggunakan alat ArborSonic 3D Acoustic Tomograph yang dapat mendeteksi tingkat kerusakan, kekeroposan, lubang tersembunyi, dan pembusukan pada massa kayu di batang pohon. Dari hasil tersebut dapat ditentukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, antara lain berupa penopangan, pemangkasan, ataupun pemberian treatment lain seperti pengendalian hama untuk menangani penyakit pada batang pohon tersebut.



Gambar 15. Penghargaan dalam rangka Jakarta Innovation Awards 2024 dari Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

- Beberapa cakupan manfaat yang didapat antara lain:
- a. organisasi mendapatkan inovasi baru produk pelayanan publik sebagai salah satu agenda reformasi birokrasi, atas implementasi gagasan perubahan berupa “Digitalisasi Kesehatan Pohon Terintegrasi (DI-KEPO-IN)” sehingga didapat nilai tambah untuk kemajuan organisasi. Lebih dari itu, dapat memudahkan pengelolaan kesehatan pohon dan pemeliharannya dengan lebih optimal di DKI Jakarta.
 - b. Manfaat bagi masyarakat à masyarakat DKI Jakarta mendapat manfaat inovasi produk pelayanan publik berupa hasil “Digitalisasi Kesehatan Pohon Terintegrasi (DI-KEPO-IN)” yang dapat diakses melalui web. Pada akhirnya bencana pohon tumbang dapat dicegah sedini mungkin, dan tercipta rasa aman dan nyaman bagi warga dalam menikmati hijau dan asrinya kota Jakarta.

3.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan berbasiskan indikator kinerja utama di level Sasaran, karena level sasaran merupakan penjabaran dari level tujuan yang disusun dengan sistem cascading. Berikut uraian analisis efisiensi anggaran, disusun berdasarkan sasaran renstra:

- a) Capaian IKU : Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau
Berikut capaian kinerja pada sasaran Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau

Tabel 31. Capaian Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi	30%	30,34%	101,13%

Pada tabel dibawah disajikan hasil perhitungan efisiensi penggunaan anggaran dengan berdasarkan capaian indikator kinerja Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi yang memiliki satu program yaitu Program Keanekaragaman Hayati. Berdasarkan tabel tersebut, dengan capaian IKU sebesar 101,13 %, didapatkan realisasi anggaran sebesar 96,7% dan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 4,43%, serta perhitungan nilai efisiensi sebesar 61,07%. Efisiensi ini secara kalkulatif didapatkan dari capaian IKU yang melampaui target yang ditetapkan (101,13%) serta dari efisiensi sisa anggaran tidak terpakai (4,43%).

Tabel 32. Perhitungan Nilai Efisiensi Indikator Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi

Capaian IKU									
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKU	Realisasi IKU	Realisasi IKU (%)	Capaian IKU	Capaian IKU	CP per UKE I/II	100,00%
1	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi	30	30,34	101,13%	101,13%	101,13%	101,13%	
Efisiensi Output Program									
Program	Output Program	Capaian IKU	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	Hasil Capaian IKU dengan Anggaran	(AA x IKU) - RA	Efisiensi	Realisasi anggaran	4,43%
1	Terselenggaranya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	101,13%	888.561.800.366	859.271.422.088	898.632.167.4349	39.360.745.3	96,70	
Nilai Efisiensi									61,07%
Capaian Sasaran IKU									
No. Iku	Sasaran	Satuan	Target IKP	Realisasi IKP	Realisasi IKP (%)	CSP per SP	CSP per Program	CSP per UE I	100,00%
1	Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	30	30,34	101,13%	101,13%	101,13%	101,13%	

- b) Capaian IKU : Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan
 Berikut capaian kinerja pada sasaran Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan

Tabel 33. Capaian Kinerja pada Sasaran peningkatan Kualitas Lahan dan hutan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan Ruang Terbuka Hijau Hutan	76,91%	77,09%	100,23%

Pada tabel dibawah disajikan hasil perhitungan efisiensi penggunaan anggaran dengan berdasarkan capaian indikator kinerja Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan RTH Hutan yang terdiri dari 5 (lima) program yaitu Program Pengelolaan Hutan, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Berdasarkan tabel tersebut, dengan capaian IKU sebesar 100,23 %, didapatkan realisasi anggaran sebesar 91,96% dan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 8,49 %, serta perhitungan nilai efisiensi sebesar 71,23%. Efisiensi ini secara kalkulatif didapatkan dari capaian IKU yang melampaui target yang ditetapkan (100,23%) serta dari efisiensi sisa anggaran tidak terpakai (8,49%).

Tabel 34. Perhitungan Nilai Efisiensi Indikator Persentase penambahan Luas dan Kualitas Lahan RTH Hutan

Capaian IKU										100,00%
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKU	Realisasi IKU	Realisasi IKU (%)	Capaian IKU	Capaian IKU (AA x IKU) - RA	Efisiensi	Realisasi anggaran	CP per IKU I/II
1	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase	76,91	77,09	100,23%	100,23%	100,23%	100,23%	100,23%	100,23%
Program	Output Program	Capaian IKU	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	Hasil Capaian IKU dengan Anggaran					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,23%	375.842.554.668	343.451.258.950	376.722.175.782	33.270.916.832	8,49%	91,96%		
2	Program Pengelolaan Hutan	100,23%	30.081.330.204	28.941.441.513	30.151.732.485	1.210.290.972				
3	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	100,23%	142.021.356	134.006.170	142.353.742	8.347.572				
4	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	100,23%	588.914.786	542.307.876	590.293.081	47.985.205				
5	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	100,23%	348.131.101	331.172.625	348.945.866	17.773.241				
Nilai Efisiensi			407.002.952.115	373.400.187.134	407.955.500.956	34.555.313.822				
										71,23%

Capaian Sasaran IKU									
No	iku	sasaran	satuan	Target IKP	Realisasi IKP	Realisasi IKP (%)	CSP per SIKU	CSP per Program	CSP per UE I
1	Persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase	76,91	77,09	100,23%	100,23%	100,23%	100,23%
									100,00%

BAB IV PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2024 menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja seluruh Bidang, Suku Dinas dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di dalam Organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Pencapaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota pada Tahun 2024 secara garis besar diukur dengan 3 (tiga) kelompok sasaran yaitu Sasaran Strategis, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional yang merupakan satu kesatuan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Dalam kelompok sasaran strategis yang terdiri atas indikator tujuan dan sasaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, terdapat 4 indikator kinerja, dan keempat indikator tersebut tercapai/melampaui target yang ditetapkan. Untuk sasaran khusus, tercapai keseluruhan sebanyak 8 indikator. Sementara untuk sasaran operasional, dari 4 indikator, 2 indikator tercapai, sementara 2 indikator lainnya tidak tercapai. Sehingga dari total 16 indikator kinerja yang diperjanjikan, 14 indikator yang tercapai dan 2 indikator tidak tercapai. Selain itu juga terdapat 21 rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD), dan keseluruhan rencana aksi KSD tersebut tercapai 100%.

Sejalan dengan capaian Kinerja, kinerja keuangan pada tahun 2024 menunjukkan capaian serapan anggaran sebesar 95,15 %. Dengan total pagu APBD sebesar Rp. 1.295.564.752.481 direalisasikan sebesar 1.232.671.609.222,-. Sisa anggaran yang tidak terserap merupakan efisiensi penggunaan anggaran tahun 2024, serta sisa pembayaran dari SPJ.

1.2 RENCANA TINDAK TAHUN 2025

Dengan hasil pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran yang kurang maksimal di tahun 2024, tentunya perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan agar kinerja di tahun mendatang bisa lebih baik lagi, yaitu diantaranya:

1. Untuk peningkatan prosentase luasan RTH dilakukan langkah pengoptimalan perolehan lahan RTH melalui serah terima fasos fasum dari BPAD karena keterbatasan penyediaan anggaran untuk pengadaan lahan melalui APBD.
2. Untuk peningkatan pencapaian IKL, perlu menggalakkan program penanaman pohon serta mengoptimalkan pemeliharaan RTH dalam rangka peningkatan luas vegetasi hutan dan non hutan (area tutupan lahan) di DKI Jakarta
3. Memetakan target kinerja dari level Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sampai level pelaksana sehingga setiap individu memiliki tanggung jawab dalam mencapai target kinerja organisasi
4. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang dan berkala agar target kinerja organisasi bisa tercapai
5. Implementasi dialog kinerja pegawai, untuk evaluasi kinerja individu serta sinkronisasi evaluasi kinerja organisasi

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA


PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Bayu Meghantara
Jabatan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama Heru Budi Hartono
Jabatan Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

setaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 Heru Budi Hartono	 Bayu Meghantara NIP 197205201991011001

3	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	1	Pemertan wilayah perumahan dengan infrastruktur hijau baru terintegrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM : - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepes Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelidikan dan Pemertan Ruang Terbuka Hijau - Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau DEFINISI : Infrastruktur hijau baru terintegrasi adalah penyediaan jalur transportasi publik, fasilitas rekreasi, dan fasilitas lain yang mendukung keberlanjutan lingkungan pada lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh Dinas Pertanahan dan Hutan Kota METODE PENGUKURAN : Jumlah kawasan yang memiliki infrastruktur hijau baru dibagi jumlah total kawasan di 5 wilayah DKI Jakarta (2022) dikalikan 100%. SUMBER DATA : Pengukuran Mandiri	73,91	73,91	75,58	75,58	77	Pertan
4	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	1	Pertanahan penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan	e-SAKIP	DASAR HUKUM : - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepes Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelidikan dan Pemertan Ruang Terbuka Hijau - Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau DEFINISI : Pertanahan luas total adalah pengalihan Dinas Pertanahan dan Hutan Kota yang telah dilakukan pertanahan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan lahan baru dan kualitas lahan. Adapun keseluruhan luas lahan hutan yang dikelola oleh Dinas Pertanahan dan Hutan Kota adalah 259,72 Ha. METODE PENGUKURAN : Luas pertanahan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan lahan dibagi luas hutan yang dikelola Dinas Pertanahan dan Hutan Kota dikali 100% SUMBER DATA : Pengukuran Mandiri	73,91	73,91	75,58	75,58	77	Pertan
5	Benar-benar Kapasitas, Profesionalitas, dan Kemandirian Aparatur	1	Pada fase penyusunan rencana aksi KSD Peninjauan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian anggaran target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	NA	100	100	100	100	Pertan
6	Bedanya Kemandirian, Keterampilan, dan Pengetahuan Masyarakat dalam Partisipasi Sosial	1	Pada fase penyusunan rencana aksi KSD Peninjauan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian anggaran target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	NA	100	100	100	100	Pertan

7	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas dan Kemampuan Layanan Masyarakat	1	Penyediaan penyediaan rencana aksi KSD Penyediaan Kualitas Infrastruktur dan layanan dasar pemerintah Sub KSD Penataan kawasan yang dikembangkan oleh Walikota Bupat	e-Money KSD	Realisasi penyediaan dan peningkatan tingkat penyediaan rencana aksi Penyediaan Kualitas Infrastruktur dan layanan dasar pemerintah Sub KSD Penataan kawasan yang dikembangkan oleh Walikota Bupat	N/A	N/A	100	100	100	Person
8	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	1	Penyediaan penyediaan rencana aksi KSD Penataan kawasan yang dikembangkan oleh Walikota Bupat	e-Money KSD	Realisasi penyediaan dan peningkatan tingkat penyediaan rencana aksi Penyediaan Kualitas Infrastruktur dan layanan dasar pemerintah Sub KSD Penataan kawasan yang dikembangkan oleh Walikota Bupat	N/A	N/A	100	100	100	Person
9	Tercapainya Peningkatan Efisiensi Kota dan Implementasi Pemertanian Berkelanjutan	1	Penyediaan penyediaan rencana aksi KSD Penataan kawasan yang dikembangkan oleh Walikota Bupat	e-Money KSD	Realisasi penyediaan dan peningkatan tingkat penyediaan rencana aksi Penyediaan Kualitas Infrastruktur dan layanan dasar pemerintah Sub KSD Penataan kawasan yang dikembangkan oleh Walikota Bupat	100	100	100	100	100	Person
10	Tercapainya Peningkatan Manajemen dan Akutabilitas Kinerja Pemerintah	1	Penyediaan penyediaan rencana aksi KSD Penataan kawasan yang dikembangkan oleh Walikota Bupat	e-Money KSD	Realisasi penyediaan dan peningkatan tingkat penyediaan rencana aksi Penyediaan Kualitas Infrastruktur dan layanan dasar pemerintah Sub KSD Penataan kawasan yang dikembangkan oleh Walikota Bupat	100	100	100	100	100	Person
11	Tercapainya Peningkatan Pola Adopsi dan Monevins Monevins Pengembangan Kota Berkelanjutan	1	Penyediaan penyediaan rencana aksi KSD Penataan kawasan yang dikembangkan oleh Walikota Bupat	e-Money KSD	Realisasi penyediaan dan peningkatan tingkat penyediaan rencana aksi Penyediaan Kualitas Infrastruktur dan layanan dasar pemerintah Sub KSD Penataan kawasan yang dikembangkan oleh Walikota Bupat	N/A	N/A	100	100	100	Person
		2	Penyediaan penyediaan rencana aksi KSD Penataan kawasan yang dikembangkan oleh Walikota Bupat	e-Money KSD	Realisasi penyediaan dan peningkatan tingkat penyediaan rencana aksi Penyediaan Kualitas Infrastruktur dan layanan dasar pemerintah Sub KSD Penataan kawasan yang dikembangkan oleh Walikota Bupat	N/A	N/A	100	100	100	Person

SASARAN KHUSUS											
12	Tercapainya pendataan dan inventarisasi tanah yang terdampak di dalam sistem informasi Jakarta Satu	1	Pencapaian penyediaan pengumpulan dan pengolahan data inventarisasi tanah bidang pertambangan pada sistem informasi Jakarta Satu sesuai standar	e-Kinerja	Jumlah data pengumpulan dan inventarisasi tanah Jakarta APD periode 2017-2022 dapat diambil angka persentase tanah di atas 100%	N/A	15%	30%	100%	100%	Persentase
					Target: DPRBP : 52 Bidang Tanah DSDA : 1282 Bidang Tanah DSM : 733 Bidang Tanah Distrik : 560 Bidang Tanah Formula Pengukuran : Jumlah laporan E-Order berdasarkan dengan realisasi anggaran kegiatan dalam tahun (apal, jumlah dan laporan (dikurangkan untuk gaji, lph, gdn, dll.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemeliharaan Daerah (SIDP)						
13	Menjayakannya Pemeliharaan E-Partisipasi dalam Pengaduan Banting dan Jaka	1	Pencapaian Pemeliharaan E-Order	e-Kinerja	Definisi: Penerapan kebijakan belian pemeliharaan RI (misalnya) signal keamanan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dengan pemroses DKI Jakarta sesuai dengan standar akurasi pemeliharaan, koordinasi sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan dan kerangka penganggaran (konversi nilai dari pemeliharaan LK) Formula Pengukuran : WTP = (100%) - (MIP - 273%) - TM = (50%) - 74P = (25%)	N/A	Q1 WTP	80%	N/A	Q3 WTP	Presisi
15	Tercapainya bisa akses pemeliharaan komunikasi publik untuk program-program umum dan upaya Pemeliharaan Daerah	1	Pencapaian Informasi media massa sebagai komunikasi publik, program unggulan atau program umum serta laporan program daerah pada saat ini dan komunikasi program	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program kegiatan dan program umum Pemerintah Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi c) Persentase tersusunnya materi informasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam waktu < 6 jam d) Peningkatan liputan publikasi media komunikasi media massa (LFD dan media massa lain media sosial atau siaran langsung) Pengukuran: a) Editor 60% PD menyusun materi strategi komunikasi program kegiatan dan program umum per bulan b) Editor 20% PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan c) Editor 30% PD menyusun materi informasi krisis per triwulan dan bahan komunikasi pada saat krisis d) Editor 30% PD menyusun materi informasi krisis dalam waktu < 6 jam e) Editor 30% PD menyusun materi informasi krisis (matras editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media massa atau media massa atau media sosial atau siaran langsung per triwulan. Kriteria: a) Editor 60% PD menyusun materi strategi komunikasi program kegiatan dan program umum per bulan b) Editor 20% PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan c) Editor 30% PD menyusun materi informasi krisis per triwulan dan bahan komunikasi pada saat krisis d) Editor 30% PD menyusun materi informasi krisis dalam waktu < 6 jam e) Editor 30% PD menyusun materi informasi krisis (matras editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media massa atau media massa atau media sosial atau siaran langsung per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
16	Tercapainya bisa akses pemeliharaan yang berkaitan dan akurat	1	Pencapaian E-Partisipasi dalam Tahun 2023	e-Kinerja	Kriteria: a) Editor 60% PD menyusun materi strategi komunikasi program kegiatan dan program umum per bulan b) Editor 20% PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan c) Editor 30% PD menyusun materi informasi krisis per triwulan dan bahan komunikasi pada saat krisis d) Editor 30% PD menyusun materi informasi krisis dalam waktu < 6 jam e) Editor 30% PD menyusun materi informasi krisis (matras editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media massa atau media massa atau media sosial atau siaran langsung per triwulan.	N/A	N/A	N/A	N/A	A (32)	Presisi

20	Peningkatan pangsa pasar produk dalam negeri	1	Pemerintah melalui berbagai kebijakan di bidang perdagangan internasional, produk ekspor, dan produk impor, serta melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pangsa pasar produk dalam negeri.	e-Kinerja	Definisi : - Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk barang hasil dan pelayanan yang diproduksi atau diberikan oleh perusahaan yang berkedudukan di Indonesia dan/atau dengan pemilikan penuh oleh pengusaha Indonesia yang berkedudukan di Indonesia. - Selanjutnya TNDN adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang berkedudukan di Indonesia dan/atau perusahaan yang berkedudukan di Indonesia yang memproduksi barang dan jasa. Formula Pengukuran : Jumlah realisasi barang dan jasa modal (berupa barang) bersertifikat TNDN dan/atau produk dalam negeri, dibandingkan dengan jumlah realisasi barang dan jasa modal (berupa barang) bersertifikat TNDN dan/atau produk dalam negeri. Sumber Data : - Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) PSCH Kementerian Dalam Negeri - Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPSD Dasar Hukum : - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri - Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penguatan Peningkatan Pergerakan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Produk Bangsa	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Persentase
21	Implementasi Penguatan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelatihan per tahun	1	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan program penguatan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelatihan per tahun.	e-Kinerja	DASAR HUKUM : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Penguatan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pasal ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelatihan dalam 1 (satu) tahun. DEFINISI : Terselenggaranya Penguatan Peningkatan Kompetensi 20 JP pelatihan untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simulasi BPSDM Jakarta.go.id dan Redesain Target Kerja dan Indikator Penguatan Kompetensi ASN Jakarta yang mengacu pada Penguatan Kompetensi dan Seluruh SPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Formula Pengukuran : $\left(\frac{\text{Jumlah data yang terinput ke aplikasi Simulasi BPSDM}}{\text{Jumlah data yang wajib terinput sesuai batas waktu pengumpulan data Minggu pertama hingga 5 Desember Tahun 2024}} \right) \times 100\%$ Sumber Data : Simulasi BPSDM	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase

22	Meningkatkan Manajemen Pengeluaran	1	Persentase penyediaan layanan manajemen pengeluaran	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengeluaran DEFINISI : Tersedia adanya Pelayanan Laporan manajemen pengeluaran untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara http://kemendagri.go.id METODE PENGUKURAN : Realisasi Target angka 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (juga dilakukan setiap bulis melalui pengumpulan foto MRPD pertama hingga 5 Bulat September Tahunan 3 dan Minggu selanjutnya 5 Bulat November Tahunan 4) SUMBER DATA : http://kemendagri.go.id	NA	NA	100%	50%	100%	Persentase
23	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko merupakan suatu pembentukan sebuah Manajemen Risiko, Unit Keptuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sesuai Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Pengukuran (SI-PR) 1. Struktur Manajemen Risiko (tipe) Penyalut Daerah dibentuk dari suatu (Kepuasan Kepala Penyalut Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko. 2. Unit Keptuhan Internal dilaksanakan oleh satu unit yang diberikan Pemilik Risiko Kepala Penyalut Daerah (level Eselon AK/kegiatan) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Penyalut Daerah. 3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap seluruh kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Penyalut Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan.	NA	100%	100%	100%	100%	Persentase

					a) Komunikasi dan Komutasi; b) Penelitian konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Pengurangan Risiko; dan e) Pemantauan. Masing-masing Tahapan diuraikan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko. Formulir Pengukuran : [Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektoral] / [Semua dokumen yang wajib terkumpul sesuai basis waktu pengumpulan pada Tahun ke-4]] x 100% Catatan Saran : - Dokumen Kebijakan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); - Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penguasaan Unit Kepertanian Internal; - Dokumen Formulir Penelitian konteks Manajemen Risiko; - Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; - Dokumen Formulir penanganan Risiko. Metode Pengukuran : Tersampainya dokumen-dokumen implementasi Perencanaan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektoral Trialan II : 1. Dokumen Keputuasan Kepala Perangkat Daerah untuk Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penguasaan Unit Kepertanian Internal Trialan III : 1. Dokumen Formulir Penelitian konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko Trialan IV : 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektoral
--	--	--	--	--	---

24	Tercapainya target kinerja Anggaran atau Agran implementasi	1	Presisi dan Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 136 "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan dapat pula memfasilitasi dan/atau mengizinkan penggunaannya untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah". Definisi Operasional: Kinerja Anggaran yang ditinjau atas aspek implementasi 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penguraian anggaran yang terungkap dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Kinerja mencapai penguraian anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/kegiatan dan pencapaian keluarannya yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Kinerja Anggaran yang ditinjau atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut: 1. Pengukuran Capaian Pelaksanaan kegiatan/kegiatan - dapat dilihat berdasarkan adanya realisasi indikator kinerja Output Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output Kegiatan) Sumber Data: e-SAGP 2. Persentase Anggaran - dapat dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan penganggaran Sumber Data: Proyek AGRIS projectmgrd@jakarta.go.id	Nilai	N/A	71%	71%	Puasan
SASARAN OPERASIONAL										
25	Terselenggaranya Tindak Lanjut Anggaran Gubernur	1	Pemantauan dan penyusunan Tindak Lanjut Anggaran Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi T. Lanjut Anggaran Gubernur, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk lain yang relevan dibagi Jumlah 11. Anggaran Gubernur adalah 100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
26	Mengapainya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Pemantauan capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi T. Aduan Masyarakat dibagi Jumlah T. Aduan Masyarakat di sat 100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
27	Mengapainya kualitas layanan masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	Jakarta	Nilai diperoleh dari survei Jakarta	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50
28	Terselenggaranya kegiatan kerja sama/ kerjasama dengan hasil pemenuhan eksternal (RISK)	1	Pemantauan kegiatan kerjasama tidak terdapat pemenuhan eksternal hasil pemenuhan eksternal hasil pemenuhan eksternal (RISK)	e-Kinerja	100% dari jumlah realisasi URP RPW RI Tahun 2023 dan selanjutnya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan URP di bawah koordinasi / jumlah data realisasi yang belum direalisasikan dari URP RPW RI tahun 2023 dan selanjutnya 100% (Validasi dan Inspeksi)	25%	25%	25%	25%	Persentase

Pl. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

[Signature]
Hery Budi Hartono

Jakarta 2023
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta

[Signature]

Bayu Meghartha
NIP. 1976020199201001

2. PENGHARGAAN DARI TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONAL

- a. Penghargaan MURI (Museum Rekor-Dunia Indonesia) Nomor 11710/R.MURI/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 atas Penanaman Vegetasi Terbanyak Untuk Penghijauan Perkotaan dalam Waktu Satu Tahun.



- b. Penghargaan dari GRAB atas *“Strategic Collaboration in Creating Positif Impact in Jakarta”*



3. BERITA ACARA TLHE SAKIP TAHUN 2023

BERITA ACARA PENYELESAIAN TRIDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DKI JAKARTA

No	Temuan Hasil Evaluasi SAKIP	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	Verifikasi		Keterangan
				Telaah sesuai	Belum sesuai	
1	Pemantauan Kinerja Komponen Pemantauan Kinerja dengan bobot 30% menggunakan rasio 21,30%, dengan penjelasan sebagai berikut : a. Telah terdapat dokumen pemantauan kinerja yaitu petak, neraca, RKU, nerja, RKA dan DPA, b. Dokumen pemantauan kinerja telah menguraikan seluruh data kinerja sistemnya yang perlu dicapai, c. Laporan keberhasilan (Indikator Kinerja) telah disampaikan secara GMRP, d. Indikator Kinerja Utama (RKU) telah menguraikan kinerja Kinerja Utama yang harus dicapai, terdapat secara berkala/pada (triwulan, - semester, tahun) dijabar dalam 1 periode pemantauan kinerja, e. Meran demikian, dalam pemantauan kinerja masih terdapat catatan yaitu : 1) Rencana aksi kinerja belum dapat terjamin dimasa karena capaian kinerja belum optimal secara berkala, 2) Setiap uraian kinerja belum mengarahkan pada, serta berdasarkan dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, 3) Belum seluruh pegawai memahami dan peduli serta bertanggung dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	1 Melakukan review secara berkala dan berjangka atas capaian kinerja untuk mewujudkan capaian sesuai dengan yang telah direncanakan 2 Melakukan pengujian/monitoring kinerja secara berjangka dan dilakukan secara berkala untuk mencapai kinerja yang diharapkan, 3 Melakukan sosialisasi mengenai pemantauan kinerja dan melakukan review secara berkala atas capaian kinerja pegawai untuk mencapai kinerja yang direncanakan	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota telah melakukan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dengan bentuk Laporan Kinerja sesuai 2 dimensi indikator kinerja dari aspek 2 telah direvisi oleh kepala seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, dengan bentuk sebagai berikut : (dokumen pendukung terlampir) 1 Pelaksanaan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Pukul 08.00 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang dihadiri oleh Sekretaris Dinas, Para Kepala Bidang, Para Kepala Subbidang dan Para Kepala UPT. Pada Rapat tersebut Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menekankan arahan untuk menyiapkan laporan realisasi kinerja setiap bulat dikumpulkan dalam sistem KSD maupun sistem Moror. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memisahkan kepala Seksi/Unit kerja untuk memantau dan mengkoordinasikan pengumpulan bulat bulat capaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota telah melakukan pengujian/monitoring kinerja dengan bentuk Laporan Kinerja sesuai 2 dimensi indikator kinerja dari aspek 2 telah direvisi oleh kepala seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, dengan bentuk sebagai berikut : (dokumen pendukung terlampir) 1 Perjarjian Kinerja Eselon 2 2 Pada level eselon 3,4 dan 5 telah mengorganisir MPPH dan SKP sebagai acuan pencapaian kinerja dimana indikator kinerja terdapat dari Perjarjian Kinerja eselon 2 3 Laporan Evaluasi Kinerja dibuat oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebagai dokumen monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota telah melakukan sosialisasi mengenai pemantauan kinerja dan telah melakukan review secara berkala atas capaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk mencapai kinerja yang direncanakan, dengan bentuk sebagai berikut : (dokumen pendukung terlampir) 1 Sosialisasi mengenai pemantauan kinerja dilaksanakan pada tanggal 18 April 2024 melalui zoom dengan agenda Rapat Koordinasi Penyusunan MPPH dan SKP 2 Moror secara berkala telah dilaksanakan, hal ini dapat dilakukan bahwa adanya Dokumen Evaluasi Perjarjian Kinerja sesuai 1 Tahun 2024 telah dibuat dan pada halaman 13 Dokumen tersebut terdapat pengelompokan dan penjelasan pada sekam indikator per brokuk jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari pada dokumen 14 terdapat tidak terdapat rencana perbaikan kualitas kinerja	✓		a. Undangan Rapat Koordinasi: 3 Juni 2024 b. Notulen Rapat: 3 Juni 2024
				✓		a. Perjarjian Kinerja (Perjarjian Eselon 2 b. MPPH dan SKP c. Dokumen Evaluasi Kinerja Sesuai 1 Tahun 2024
				✓		a. Undangan Rapat b. Dokumen Evaluasi Perjarjian Kinerja Sesuai 1 Tahun 2024

